

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPERAN DALAM
KEMENANGAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2009 (STUDI
KASUS KEMENANGAN Drs. DARMIZAR DI KENEGERIAN KOPAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

SKIRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Sarjana
Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sulthan Syarif Kasim Riau**



OLEH

**RISTUMOYO
NIM: 10775000010**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
RIAU
2013**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan yang telah ditetapkan untuk dapat mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri dengan Judul **"ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPERAN DALAM KEMENANGAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2009 (STUDI KASUS KEMENANGAN Drs.DARMIZAR DI KENEGERIAN KOPAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)"**

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dengan teliti dan cermat, namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan keterbatasan ilmu dan sarana yang dimiliki penulis. Tetapi hal ini tentunya bukan kesengajaan dari penulis, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Nazir, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Muslim., S.Sos, M.Si Selaku pembimbing yang telah banyak memberi masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmunya selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu kelancaran dalam proses belajar mengajar.
7. Bupati Kuantan Singingi beserta staf yang telah memberikan bantuan moril dan materil dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi beserta staf yang telah memberikan bantuan berupa data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
9. Ninik Mamak Kenegerian Kopah yang memberikan data dan informasi dari penulisan skripsi ini.
10. Drs.Darmizar yang bersedia memberikan data dan informasi secara terperinci dari penulisan skripsi ini.
11. Orang tua tercinta yang telah memberikan dorongan dan semangat baik secara langsung maupun tersirat untuk penyelesaian studi penulis.
12. Terima kasih kepada datuk dan nino, mamak dan amai, etek dan pak etek, adek dan kaponakan, dan semua keluarga besar yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, saya haturkan banyak dan ribuan terima kasih telah memberikan motivasi dan semangat sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Pekanbaru, 24 Oktober 2013
Penulis

RISTUMOYO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN SKIRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Perumusan Masalah	9
1.3.Tujuan Penelitian	9
1.4.Manfaat Penelitian	9
 BAB II. TINJAUAN TEOROTIS	
2.1. Otonomi Daerah	11
2.2. Pemilu	17
2.3. Peran.....	21
2.4. Ninik Mamak	24
2.5. Penelitian Pendahuluan	25
2.6. Konsep Operasional.....	26
2.7.Operasional Variabel.....	27
 BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
1.1. Waktu dan Tempat Penelitian	30
1.2. Sumber Data.....	30
1.3.Populasi dan Sampel	31
1.4. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1.5. Teknik Analisi Data	33
 BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1.Sejarah Ringkas Kabupaten Kuantan Singingi	34

4.2.Kondisi Geografi, Tofografi, Hidrologi, Klimatologi	35
4.3.Komposisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan	37
4.4.Keadaan Kecamatan Kuantan Tengah.....	43

BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

5.1.Jenis Kelamin dan Umur Responden	45
5.2.Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Responden.....	46
5.3. Analisis Faktor-faktor Yang Berperan Dalam Kemenangan Calon Anggota Legislatif Tahun 2009 (Studi Kasus Kemenangan Drs.Darmizar di Kenegerian Kopah Kabupaten Kuantan Singingi).....	47

BAB VI PENUTUP

6.1.Kesimpulan	72
6.2.Saran	75

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah suara masing-masing calon dari Kenegerian Kopah... ..	6
2. Operasional Variabel Menurut Indikatornya	29
3. Rasio Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013	38
4. Nama Dinas di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013	40
5. Nama Badan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013	40
6. Nama-nama Bupati di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2000-2013	41
7. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan atau Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013	42
8. Identitas responden berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan	45
9. Rekapitulasi jawaban responden tentang social budaya dalam kemenangan calon anggota legislatif tahun 2009.....	52
10. Rekapitulasi jawaban responden tentang tentang lingkungan keluarga dalam kemenangan calon anggota legislative tahun 2009.....	59
11. Rekapitulasi jawaban responden tentang ekonomi dalam kemenangan calon anggota legislative tahun 2009.....	64
12. Rekapitulasi jawaban responden tentang pendidikan dalam kemenangan calon anggota legislative tahun 2009.....	68

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPERAN DALAM
KEMENANGAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2009 (*Studi
Kasus Kemenangan Drs.Darmizar Di KenegerianKopah Kabupaten Kuantan
Singingi*)**

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji analisis faktor-faktor yang berperan dalam kemenangan calon anggota legislatif tahun 2009 (*Studi Kasus Kemenangan Drs.Darmizar di Kenegerian Kopah Kabupaten Kuantan Singingi*) yang mana kajian ini mengkhususkan pada proses dan peran ninik mamak dalam pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009 di Kabupaten Kuantan Singingi, sehubungan dengan diluncurkannya semangat otonomi daerah. Sebagai manifestasi terwujudnya desentralisasi yang dilimpahkannya sebagian wewenang pusat kepada daerah.

Nuansa demokrasi yang mulai lahir dari awal era reformasi juga tergambar dari banyaknya partai politik peserta pemilu 1999 yang dikenal dengan istilah multipartai. Wacana demokratisasi di Indonesia tidak hanya sampai disitu, terus berjalan sesuai dengan tuntutan dan keinginan bersama para elit yang didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia melalui pembentukan dan pelaksanaan Undang-undang Pemilu secara langsung.

Keberhasilan pelaksanaan Pemilu ini tidak serta merta berarti proses demokrasi di Indonesia juga berhasil atau terkonsolidasi. Hal ini diungkap oleh William Liddle yang mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia belum terkonsolidasi dengan baik. Keharusan demokrasi tambah Liddle adalah menjadi sistem politik yang normal dalam kancah perpolitikan Indonesia sekarang ini. Salah satu pilar demokrasi menurut Jhon Locke adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.

Apa yang telah di jelaskan tersebut diatas menyebabkan bentuk peranan politik secara umum dan luas serta lebih mudah diamati dilingkungan masyarakat ialah pemberian suara pada pemilu. Peranan politik dalam pemberian suara tersebut adalah dipilihnya secara langsung Anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah baik Proponsi maupun Kabupaten/Kota oleh masyarakat. Demokrasi rakyat menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip *trias politica* dengan kekuasaan negara yang dipilih oleh rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Temuan penelitian ini adalah *Pertama*, peranan ninik mamak yang menjadi penentu kemenangan Drs.Darmizar dalam pemilihan calon anggota legislatif di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2009. *Kedua*, sepanjang perjalanan politik yang terjadi di Indonesia teori baru tentang politik sudah mulai dipegang oleh peranan masyarakat adat.. *Ketiga*, sebagai penentu hasil penelitian ini ditentukan oleh empat indikator penelitian ini yaitu sosial budaya, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan keluarga.

Kata Kunci : *Analisis, faktor-faktor, peranan, kemenangan dan ninik mamak*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemberlakuan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan implikasi kepada daerah untuk secara proaktif mengembangkan rencana dan kebijakan pembangunan daerahnya. Otonomi Daerah ini mendorong pertumbuhan kemandirian daerah dengan pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) dengan mengakomodasikan berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penyesuaian kewenangan dan fungsi penyediaan pelayanan antar Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota memuat tujuan politis, maupun teknis. Secara politis, desentralisasi kewenangan pada masing-masing daerah menjadi perwujudan dari suatu tuntutan reformasi seperti direfleksikan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Secara teknis masih terdapat sejumlah besar persiapan yang harus dilakukan untuk menjamin penyesuaian kewenangan dan fungsi-fungsi tersebut secara efektif.

Secara umum, prinsip dasar yang harus dipegang oleh semua pihak dalam pelaksanaan Otonomi Daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

ini ada lima hal; *Pertama*, otonomi daerah harus dilaksanakan dalam konteks Negara kesatuan. *Kedua*, pelaksanaan Otonomi Daerah menggunakan tata cara desentralistik, dengan demikian peran daerah sangat menentukan. *Ketiga*, pelaksanaan Otonomi Daerah harus dimulai dengan mendefinisikan kewenangan, organisasi, personal kemudian diikuti dengan keuangan, bukan sebaliknya. *Keempat*, perimbangan keuangan yang dimaksud adalah perimbangan horizontal/ antar Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota, di samping itu perimbangan vertikal, antar pusat dan daerah. *Kelima*, fungsi pemerintah Pusat masih sangat vital, baik dalam kewenangan strategis (moneter, pertahanan, luar negeri, dan hukum), untuk mengatasi ketimpangan antar Daerah (Kaloh, 2002: 47).

Menjelaskan bahwa pemilihan umum menurut UU No. 32 tahun 2004. Pelaksanaan otonomi daerah mendidik masyarakat dan pemerintah dalam pencapaian sistem demokratisasi di Indonesia, selama tahun 2005 merupakan kedaulatan rakyat dan pelajaran politik baru bagi Indonesia. Pemilihan anggota legislatif tahun 2009 secara langsung menjadi solusi elegan sekaligus terobosan untuk mengatasi kemacetan demokrasi lokal. Dengan demikian, guliran perubahan akan terus berlangsung dari tingkat nasional ke tingkat lokal. Khususnya yang diamanatkan dalam UU.No.32 tahun 2004 telah memunculkan arus besar dalam sistem pemerintahan daerah, yaitu arus yang berorientasi pada kepentingan masyarakat (*partisipatif-populis*) khususnya masyarakat adat yang merupakan corong dan teori baru dalam perjalanan politik lokal.

Runtuhnya kekuasaan Orde Baru 21 Mei 1998 silam yang ditandai dengan lahirnya reformasi lewat berbagai perjuangan organisasi mahasiswa telah terjadi bermacam-macam pembenahan khususnya produk-produk politik. Agenda ini adalah upaya keinginan bersama untuk mewujudkan demokrasi yang lebih sempurna. Produk politik yang dilahirkan mislanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kebebasan menyampaikan Pendapat Dimuka Umum dan disusul oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.(Mukhlis Hamdi: 2006. 34)

Bergulirnya Otonomi Daerah merupakan era keterbukaan yang dibuktikan dengan era reformasi, baik reformasi birokrasi maupaun reformasi politik secara massif dan aktif, dari tingkat pusat sampai ke tingkal lokal.Inilah amanat undang-undang yang menurut penulis harus diikuti secara benar dan demokratis.

Nuansa demokrasi yang mulai lahir dari awal era reformasi juga tergambar dari banyaknya partai politik peserta pemilu 1999 yang dikenal dengan istilah multipartai. Wacana demokratisasi di Indonesia tidak hanya sampai disitu, terus berjalan sesuai denga tuntutan dan keinginan bersama para elit yang didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia melalui pembentukan dan pelaksanaan Undang-undang Pemilu secara langsung.

Keberhasilan pelaksanaan Pemilu ini tidak serta merta berarti proses demokrasi di Indonesia juga berhasil atau terkonsolidasi. Hal ini diungkap oleh William Liddle yang mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia belum terkonsolidasi dengan baik. Keharusan demokrasi tambah Liddle (Dalam Priyono, dkk., 2007: 43-44) adalah menjadi sistem politik yang normal dalam kancah

perpolitikan Indonesia sekarang ini. Salah satu pilar demokrasi menurut Jhon Locke (1632-1704) adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain (Budiardjo, 2004: 151).

Apa yang telah di jelaskan tersebut diatas menyebabkan bentuk peranan politik secara umum dan luas serta lebih mudah diamati dilingkungan masyarakat ialah pemberian suara pada pemilu. Peranan politik dalam pemberian suara tersebut adalah dipilihnya secara langsung Anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah baik Proponsi maupun Kabupaten/Kota oleh masyarakat. Demokrasi rakyat menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip *trias politica* dengan kekuasaan negara yang dipilih oleh rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuansing disebut pula dengan rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau (*Rantau nan Tigo Jurai*). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Kabupaten ini berada di bagian barat daya Propinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu.

Ninik Mamak di Kabupaten Kuantan Singingi adalah tokoh masyarakat yang mengetahui dan menguasai seluk beluk adat. Disamping sebagai pembimbing anak kemenakan, juga bertanggung jawab atas kelestarian adat itu sendiri.

Tegaknya adat dalam sebuah kenegarian berada dalam suatu wadah yang dinamakan *Kepala Suku*, dan di Kenegarian Kopah bernama *Datuak Penghulu Suku*.(UU Hamidi. 2001: 25)

Dalam ranji adat yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dapat penulis sampaikan bahwa cucu kemenakan lebih patuh dan menghormati lebih dari orang tua sendiri, begitu pentingnya peran dari ninik mamak yang disebut dengan *Datuak Penghulu Suku*.Keputusan suku dan keputusan politik lokal sejatinya sudah merupakan hak dan tanggung jawab ninik mamak.Karena sesuai dengan amanat undang-undang setiap warga Negara menggunakan hak dan kewajibannya dalam perjalanan NKRI, begitu juga masyarakat adat yang merupakan bagian dari warga negara.

Di Kenegerian Kopah terdapat lima desa (Desa Jaya, Desa Munsalo, Desa Koto Tengah, Desa Koto Tuo, dan Desa Pulau Baru), dan didalam kenegerian itu terdapat empat suku dan empat ninik mamak setiap suku (Suku Paliang, Suku Melayu, Suku Caniago, Suku Patopang). Jadi diantara empat suku tersebut dikepalai oleh orang yang dituakan yaitu datuk suku.

Dalam perjalanannya masyarakat Kenegerian Kopah sebelum tahun 2009 belum pernah mengutus wakilnya di DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, oleh karena permasalahan adat yang berkenaan dengan tanah ulayat tidak ada yang memperjuangkan melalui badan legislatif maka ditetapkan bahwa dalam rapat adat saudara Drs.Darmizar diutus oleh ninik mamak untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat kenegeriaan Kopah.

Peranan datuk suku merupakan hal yang sangat mendukung dalam kemenangan Drs. Darmizar dalam pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009 di Kabupaten Kuantan Singingi. Cucu kemenakan yang ada di Kenegerian Kopah tersebut di haruskan memilih Drs. Darmizar karena sudah menjadi ketetapan dalam rapat suku yang ada di Kenegerian Kopah dan di sahkan oleh datuk suku.

Sebagai konsekuensi politik saudara Drs. Darmizar pada pemilu legislatif 2009 terhadap masyarakat Kenegerian Kopah adalah sebagai perpanjangan tangan dan perwakilan masyarakat Kenegerian Kopah di lembaga DPRD Kuantan Singingi. Salah satu program kerja atau visi misi yang dititipkan oleh masyarakat Kenegerian Kopah adalah menyelesaikan masalah konflik tanah ulayat yang terjadi di Kenegerian Kopah, serta mengusahakan Kenegerian Kopah untuk menjadi kecamatan, selain itu masyarakat mengharapkan setiap pembangunan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi harus disalurkan sebagai wujud pembangunan Kenegerian Kopah dan membangun sekretariat untuk mahasiswa Kenegerian Kopah.

Tabel. 1.1
Jumlah Suara masing-masing calon anggota Legislatif 2009 Dari
Kenegrian Kopah

No	Nama Calon Anggota Legislatif	Suara
1	Rio Kasiter, S.Sos (GOLKAR)	230
2	Drs. Darmizar (PPP)	2.273
3	Endriyus (PPD)	415
Jumlah		2918

Sumber: Data Lapangan 2009

Dari pantauan dan pengamatan di beberapa Kenegerian yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi atas laporan dan amatan dilapangan tidak terdapat kecurangan dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2009, misalnya adanya isu *money politic*, intimidasi terhadap warga, dan masih banyak pelanggaran lainnya. Karena dorongan masyarakat telah ditetapkan oleh keputusan bersama tokoh, pemuka, dan ninik mamak yang ada di Kenegerian Kopah.

Ada salah satu fenomena masyarakat adat yang menarik perhatian penulis saat pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009 di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari amatan penulis dilapangan terlihat bahwa masyarakat dari beberapa desa yang terdapat di Kenegrian Kopah sangat ber-antusias untuk mengikuti pesta demokrasi lokal tahunan itu. Bentuk antusiasme masyarakat adat adalah besarnya paetisipasi cucu kemenakan berbondong-bondong datang ke TPS diamana mereka mendaftar agar terdaftar pemilih tetap (DPT) untuk menggunakan hak suaranya. Partisipasi politik cucu kemenakan yang sangat diamati adalah pemberian suara atau hak pilih masyarakat adat terhadap saudara Drs. Darmizar yang ditetapkan dalam rapat adat di Kenegerian Kopah.

Dalam perolehan suara pemilihan umum legislatif tahun 2009 Drs. Darmizar mendapatkan suara mayoritas dari Kenegrian Kopah khususnya desa-desa yang terdapat dalam Kenegerian Kopah tersebut. Umumnya pada desa-desa yang terdapat di daerah pemilihan satu (dapil 1) Kecamatan Kuantan Tengah tidak terlalu signifikan karena suara mayoritas diperoleh oleh utusan masing-masing kenegerian, seperti Kenegerian Sentajo, Kenegerian Kari, dan Kenegerian Teluk Kuantan. Untuk lebih jelasnya penulis menjelaskan dalam table berikut ini

Tabel 1.2
Perolehan Suara Drs. Darmizar Berdasarkan Kenegrian Yang Terdapat
Daerah Pemilihan 1 (Dapil 1) 4 Kenegrian

Kenegrian Kopah

No	Desa	Suara
1	Koto Tuo	234 Suara
2	Koto Tonga	165 Suara
3	Jaya	920 Suara
4	Pulau Baru	555 Suara
5	Munsalo	280 Suara
	Jumlah	2.154 Suara

Data Lapangan 2013

Kenegrian Sentajo

No	Desa	Suara
1	Kampung Baru Sentajo	-
2	Koto Sentajo	-
3	Pulau Kopung Sentajo	30 Suara
4	Pulau Komang Sentajo	18 Suara
5	Muaro Sentajo	-
	Jumlah	48 Suara

Data Lapangan 2013

Kenegrian Taluk

No	Desa	Suara
1	Koto Teluk	-
2	Sawah	7 Suara
3	Kelurahan Pasar Teluk	15 Suara
4	Seberang Taluk	21 Suara
5	Kelurahan Simpang Tiga	-
6	Beringin Teluk	-
		43 Suara

Data Lapangan 2013

Kenegrian Kari

No	Desa	Suara
1	Bandar Alai	-
2	Sitorajo	-
3	Pulau Godang	14 Suara
4	Pintu Gobang	5 Suara
5	Ciberlin	9 Suara
6	Koto Kari	-
		28 Suara

Data Lapangan 2013

Dari table diatas dapat disimpulkan perolehan suara Drs.Darmizar pada pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009 di Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Tengah tersebar diberbagai desa yang ada di daerah pemilihan satu (Dapil 1), hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa suara yang diperoleh oleh Drs.Darmizar melalui pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009, sedikit banyaknya disetiap desa mendapatkan suara walaupun tidak signifikan, karena hubungan kekerabatan dan persahabatannya.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik meneliti **Analisis Faktor-faktor Yang Berperan Dalam Kemenangan Calon Anggota Legislatif Tahun 2009(Studi Kasus Kemenangan Drs.Darmizar Di Kenegerian Kopah Kabupaten Kuantan Singingi)**

1.2. Perumusan Masalah.

Faktor apa saja yang berperan dalam kemenangan Drs.Darmizara pada pemilu legislatif tahun 2009 di kenegerian kopah kabupaten kuantan singingi?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berperan dalam kemenangan Drs. Darmizar pada pemilu legislatif tahun 2009 di kenegerian kopahKabupaten Kuantan Singingi.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan akan bermanfaat kepada masyarakat luas, antara lain:

- a. Sebagai referensi dan masukan bagi peneliti di masa mendatang dalam mengkaji masalah peranan Ninik Mamak dalam proses kemenangan Drs.Darmizar pada Pemilu Legislatif 2009 di kenegerian kopah Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Peranan ninik mamak pada pemilu legislatif tahun 2009 di kenegerian kopah Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Partisipasi memberikan hak suara pada pemilu legislatif tahun 2009 di kenegerian kopah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

TINJAUAN TEOROTIS

2.1.Otonomi Daerah

Sentralisasi kekuasaan yang berpusat di Jakarta selama lebih dari 32 tahun pemerintahan Orde baru kini sedang dipudarkan oleh proses deregulasi, privatisasi dan desentralisasi politik. Gejala ini misalnya ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah yang menggantikan undang-undang 22 tahun 1999. Undang-undang tersebut mendorong lokalisasi politik secara meluas dan menyebar di seluruh pelosok negeri. Seiring proses tersebut, kekuasaan politik juga makin terdistribusikan secara nyata ke pemerintah daerah. Pendeknya, desentralisasi telah menciptakan proses lokalisasi politik dan terbentuknya ruang-ruang dan arena-arena politik baru ditingkat lokal (AE Priyono dkk, 2007: 127).

Dalam undang-undang tersebut pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah atau kabupaten dan kota di seluruh Indonesia untuk mengurus dan mengelola rumah tangganya sendiri. Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi pembentukan sistem politik lokal. Untuk lebih jelasnya apa itu desentralisasi dan otonomi daerah, secara harfiah desentralisasi berarti jauh dari pusat (*away from center*).

Dari perspektif politik diartikan *transference of authority, legislative, judicial, or administration, from higher level of goverment to a lower level* atau devolusi kekuasaan pemerintahan pusat ke pemerintahan lokal atau penyerahan

kekuasaan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dengan alasan agar pemerintah daerah memiliki kemampuan memberikan perhatian (*Responsiveness*) dan akuntabilitas karena pemerintah daerah lebih dekat kepada warganya untuk memberikan pelayanan publik (Mukhlis Hamdi, 2006).

Sosialisasi politik adalah cara-cara belajar seseorang terhadap pola-pola sosial yang berkaitan dengan posisi-posisi kemasyarakatan seperti yang diketengahkan melalui bermacam-macam badan masyarakat. Almond dan Powell, sosialisasi politik sebagai proses dengan mana sikap-sikap dan nilai-nilai politik ditanamkan kepada anak-anak sampai mereka dewasa dan orang-orang dewasa direkrut ke dalam peranan-peranan tertentu. Greenstein dalam karyanya "*International Encyclopedia of The Social Sciences*" 2 definisi sosialisasi politik: a. Definisi sempit, sosialisasi politik adalah penanaman informasi politik yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek yang oleh badan-badan instruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab ini. b. Definisi luas, sosialisasi politik merupakan semua usaha mempelajari politik baik formal maupun informal, disengaja ataupun terencana pada setiap tahap siklus kehidupan dan termasuk didalamnya tidak hanya secara eksplisit masalah belajar politik tetapi juga secara nominal belajar bersikap non politik mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan. Easton dan Denuis, sosialisasi politik yaitu suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya. Menurut Almond sosialisasi politik adalah proses-proses pembentukan sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku. Proses sosialisasi dilakukan melalui berbagai tahap sejak dari

awal masa kanak-kanak sampai pada tingkat yang paling tinggi dalam usia dewasa. Sosialisasi beroperasi pada 2tingkat:a.Tingkat KomunitasSosialisasi dipahami sebagai proses pewarisan kebudayaan, yaitu suatu sarana bagisuatu generasi untuk mewariskan nilai-nilai, sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.(Miriam Budiarjo:2000)

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorangterhadap lingkunganmasyarakat dan politik (Eko, 2000:14). Tingkat kesadaran politik diartikansebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalahkenegaraan dan atau pembangunan (Budiarjo, 1985:22).c. Pengetahuan Masyarakat terhadapProses Pengambilan Keputusan. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yangakan diambil (RamlanSurbakti 1992:196).d. Kontrol Masyarakat terhadap Kebijakan Publik.Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasaikebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu obyek kebijakan tertentu (Arnstein, 1969:215). Kontrol untuk mencegah danmengeliminir penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik (Setiono,2002:65).Kontrol masyarakat dalam kebijakan publik adalah *the power of directing*. Juga mengemukakan ekspresi politik,memberikan aspirasi atau masukan (ide, gagasan) tanpa intimidasi yangmerupakan problem dan harapan rakyat (Widodo, 2000:192), untuk meningkatkankesadaran kritis dan keterampilan masyarakat melakukan analisis dan pemetaanterhadap persoalan aktual dan merumuskanagenda tuntutan mengenai pembangunan (Cristina, 2001:71).3. Faktor Fisik Individu dan

Lingkungan Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatanya (K. Manullang dan Gitting, 1993:13).

4. Faktor Nilai Budaya Gabriel Almond dan Sidney Verba (1999:25), Nilai budaya politik atau *civic culture* merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakekatnya adalah politik baik etika politik maupun teknik (Soemitro 1999:27) atau peradapan masyarakat (Verba, Sholozman, Bradi, 1995). Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.

Budaya politik partisipasi adalah salah satu jenis budaya politik bangsa. Budaya politik partisipandicirikan dengan adanya orientasi yang tinggi terhadap semua objek politik, baik objek umum, input, output serta pribadinya sendiri selaku warga negara. Pelaksanaan budaya politik partisipan juga dapat diterapkan oleh seorang pelajar di lingkungan sekolahnya.

Dalam undang-undang 22/1999-32/2004 dijelaskan desentralisasi dan Otonomi Daerah. Pada BAB I Pasal 1 *point* (c), bahwa desentralisasi adalah penyerahaan wewenangan pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan di *point* (h) otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas

daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2001: 243).

Menurut Ermaya Suradinata bahwa penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Memperhatikan pendewasaan aspek demokrasi, keadilan, pemertaan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab yang diletakkan pada daerah kabupaten/kota sedang provinsi sangat terbatas.
- c. Harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
- d. Harus meningkatkan daerah otonomi.
- e. Harus meningkatkan peranan dan fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- f. Azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
- g. Tugas pembantuan dimungkinkan dari pemerintah kepada daerah, dari pemerintah dan daerah kepada desa disertai pembiayaan, sarana prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melapor dan mempertanggung jawabkan kepada yang menungaskan.

Dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah terdapat beberapa strategi yang harus dilakukan agar mencapai hasil yang maksimal, antara lain :

1. Penataan Kewenangan

Mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di era reformasi dan desentralisasi pemerintah adalah melakukan penataan pemilihan kewenangan, organisasi perangkat daerah dekonsentrasi, standar pelayanan minimal serta kemitraan badan eksekutif dan badan legislatif.

2. Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah yaitu Kepala Daerah dan DPRD dan Birokrasi setempat.

3. Pemberdayaan Daerah

Keberhasilan otonomi daerah adalah dengan kerja keras dan disiplin semua pihak dan melalui proses serta mekanisme institusi dan konstitusi yang telah disepakati, dengan memanfaatkan segala potensi, secara rasional, efisien, efektif dan profesional.

4. Prasyarat Daerah Otonomi

Dalam pelaksanaan otonomi daerah prasyarat yang harus dipenuhi sebagai daerah otonomi, yaitu (1) sumberdaya manusia aparatur yang berkeahlian, (2) adanya sumber dana untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan, pembangunan,

pelayanan publik, (3) tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan pemerintah daerah.

5. Pola Daerah Otonomi

Dalam undang-undang 32 tahun 2004 dikenal tiga pola otonomi yaitu, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Disamping sebagai daerah otonomi, provinsi juga ditetapkan sebagai daerah administratif dalam rangka dekonsentrasi, dengan demikian Gubernur memiliki peranan ganda (Widjaja, 2001: 90-92).

Selain pelimpahan wewenang kepada daerah, daerah otonom dituntut untuk memberdayakan sektor swasta dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam hal pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Aspek politik misalnya, sebagai bentuk mewujudkan demokratisasi di daerah dan menumbuhkan dinamika politik lokal, dalam Undang-undang 32 tahun 2004, di atur tentang format pemilihan kepala daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam undang-undang tersebut masyarakat lebih berperan aktif menentukan pemimpinnya yang dibungkus dalam format Pemilukada langsung.

2.2. Pemilu

Menciptakan sistem pemilihan umum (pemilu) merupakan seni dan sekaligus ilmu. Disitu tercakup seni kemungkinan mana kala kalangan elit politik setuju untuk berkompromi atas suatu sistem yang tidak merugikan mereka dalam pemilu. Namun, rancangan sistem pemilu juga bergantung pada ilmu pemahaman tentang bagaimana sistem-sistem yang berbeda dapat meningkatkan hasil-hasil

yang berbeda dan memberi berbagai dorongan kepada para pemimpin politik dan para pengikut mereka. Ilmu itu sering bersifat tentatif sebab ia mencakup ramalan akan kekuatan partai di masa depan, perilaku pemungutan suara, dan peranan kepemimpinan yang tak dapat diramalkan.

Kadang-kadang sistem pemilu dihasilkan melalui persetujuan dari kalangan luas, dan di saat lain sistem tersebut dipaksakan oleh kelompok yang dominan. Bukti itu menyiratkan bahwa sistem pemilu yang paling awet dan paling berhasil adalah yang dihasilkan melalui perundingan yang dilakukan secara terbuka, panjang lebar, dan melibatkan banyak pihak jika informasi disebarkan secara maksimal dan keabsahan sistem pemilu didasarkan pada kenyataan bahwa yang menghasilkan sistem tersebut adalah seluruh kekuatan politik penting yang ada didalam masyarakat (Juan J. Linz *et al*: 2001,101)

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah merupakan wujud dari pelaksanaan pembangunan politik desentralisasi dan otonomi daerah secara nyata demi berjalannya proses demokrasi menuju demokrasi ditingkat lokal dalam kancah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005, bahwa Pemilukada yang dilaksanakan di Provinsi, Kabupaten/Kota dipilih secara langsung oleh rakyat, dengan demikian rakyat diberikan kesempatan dan kebebasan untuk menentukan pilihan yang sesuai dengan hati nuraninya masing-masing.

Nuansa demokrasi yang mulai lahir dari awal era reformasi juga tergambar dari banyaknya partai politik peserta pemilu 1999 yang dikenal dengan istilah

multi partai. Wacana demokratisasi di Indonesia tidak hanya sampai disitu, akan tetapi akan terus berjalan sesuai dengan tuntutan dan keinginan bersama para elit yang didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia melalui pembentukan dan pelaksanaan Undang-undang Pemilu secara langsung.

Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaan Pemilu ini tidak semata-mata berarti proses demokrasi di Indonesia juga berhasil atau terkonsolidasi. Hal ini diungkap oleh William Liddle yang mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia belum terkonsolidasi dengan baik. Keharusan demokrasi tambah Liddle (Dalam Priyono, dkk., 2007: 43-44) adalah menjadi sistem politik yang normal dalam kancah perpolitikan Indonesia sekarang ini. Salah satu pilar demokrasi menurut Jhon Locke (1632-1704) adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain (Budiardjo, 2004: 151).

Apa yang telah dijelaskan tersebut di atas bahwa bentuk partisipasi politik secara umum dan luas serta lebih mudah diamati di lingkungan masyarakat ialah pemberian suara pada pemilu. Partisipasi politik dalam pemberian suara tersebut adalah dipilihnya secara langsung Anggota DPR, DPRD, DPD Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota oleh masyarakat. Demokrasi rakyat menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip *trias politica* dengan kekuasaan Negara yang dipilih oleh rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Menurut Narwoko dan Suyanto (2006:200), menyebutkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pemberian suara umum kemenangan suatu partai ataupun individu dalam pemilu disebabkan oleh:

1. Faktor Sosial Budaya

yaitu yang dimaksud dengan faktorsosial budaya adanya ikatan primodialisme antara calon maupun kelompok pendukung atas dasar solidaritas etnis, suku, struktur sosial budaya, atau sentimen keadaerah.

2. Faktor Lingkungan Keluarga

Yang dimaksud faktor lingkungan keluarga adalah faktor yang disebabkan adanya pengaruh seorang kepala keluarga atas hubungan perkawinan dan lingkungan keluarga.

3. Faktor Ekonomi

Pada faktor ekonomi yang menjadi ukuran adalah mata pencaharian dan pendapatan masyarakat.

4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan dilihat dari tingkat pendidikan formal dan pendidikan politik masyarakat pedesaan.

Sedangkan untuk Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tersebut dalam konteks eksplisit dimuat dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditambah dengan petunjuk teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah. Dalam Undang-undang tersebut sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 bahwa Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Alfitra Salam menjelaskan bahwa apa yang telah dirumuskan dalam bentuk peraturan merupakan konsep yang menjadi rujukan dan untuk dilaksanakan secara arif dan bijaksana, karena PemiluKada sebagaimana yang telah dijelaskan pada Undang-undang di atas dituntut keraifan masyarakat lokal untuk berpartisipasi politik secara langsung dalam pemilihan kepala daerah. Walaupun kekhawatiran sebaian kecil pakar hukum menilai masih terdapatnya kekurangan dalam peraturan tersebut. Dan yang pasti peraturan tersebut setidaknya telah mengantarkan pemilihan kepala daerah kepada pola dan mekanisme yang baru dan baik dari sebelumnya (Tabloid Dayung Riau Edisi VIII, 2005).

2.3.Peran

Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Peranan menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekanto, sebagai berikut: Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. (Kozier Barbara, 1995:21).

Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh. Anda di posisi mana dalam suatu strata sosial dan sejauhmana pengaruh Anda. Itulah peran. Peran adalah kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu bekerja, baik secara organisasi dan organisasi. Peran memang benar-benar kekuasaan yang bekerja, secara sadar dan hegemonis, meresap masuk, dalam nilai yang diserap tanpa melihat dengan mata terbuka lagi. Peran, adalah simbiosis yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian, sebab dengan peran, ada yang dirugikan dan diuntungkan. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.

Menurut Horton dan Hunt [1993], peran (role) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton [1968] dinamakan perangkat peran (role set). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (nature) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (reward) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan. Sedangkan, Abu Ahmadi [1982] mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Henslin (2007) mendefinisikan peran (role) sebagai perilaku, kewajiban dan hak yang melekat pada suatu status. Lebih jauh, Henslin menyebutkan bahwa arti penting sosiologis dari suatu peran adalah "...memaparkan apa yang diharapkan dari (sese)orang". Jika masyarakat dianalogikan sebagai sebuah pementasan drama, maka peran diibaratkan sebagai aturan yang "...mengekan orang – mengatakan kepada mereka kapan harus 'masuk' dan kapan harus 'keluar'...". Dengan kata lain, peran dapat diartikan sebagai batasan-batasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh, patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang (atau suatu institusi) di tengah masyarakat di sekitarnya.

2.4.Ninik Mamak

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuansing disebut pula dengan rantau Kuantan. Kabupaten ini berada di bagian barat daya Propinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu.

Ninik Mamak di Kabupaten Kuantan Singingi adalah tokoh masyarakat yang mengetahui dan menguasai seluk beluk adat. Disamping, pembimbing anak kemenakan, juga bertanggung jawab atas kelestarian adat itu sendiri. Tegaknya adat dalam sebuah kenegarian berada dalam suatu wadah yang dinamakan **Kepala Suku**, dan di Kenegarian Kopah bernama *Datuak Penghulu Suku*.

Di Kenegarian Kopah terdapat lima desa terdiri dari Desa Jaya, Desa Munsalo, Desa Koto Tengah, Desa Koto Tuo, dan Desa Pulau Baru, dan didalam kenegarian itu terdapat empat suku dan empat ninik mamak setiap suku yakni

Suku Paliang, Suku Melayu, Suku Caniago, Suku Patopang. Jadi diantara empat suku tersebut dikepalai oleh orang yang dituakan yaitu datuk suku.

Peranan datuk suku merupakan hal yang sangat mendukung dalam kemenangan Drs. Darmizar dalam pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009 di Kabupaten Kuantan Singingi. Cucu kemenakan yang ada di Kenegerian Kopah tersebut di haruskan memilih Drs. Darmizar karena sudah menjadi ketetapan dalam rapat suku yang ada di Kenegerian Kopah dan di sahkan oleh datuk suku.

2.5. Penelitian Pendahuluan

Selanjutnya, hubungan dengan nilai-nilai pendidikan, penulis menemukan karya-karya ilmiah berbentuk skripsi yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Seperti karya Ahmad Riyanto, *Partisipasi Politik Masyarakat Pedesaan Pada Pemilu Kepala Daerah Tahun 2006 (Studi di Kota Solo)*". Skripsi tahun 2006. Sarjan M. "*Partisipasi Politik Masyarakat Pedesaan Dalam Pemberian Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kecamatan Kuantan Hilir)*", Ikhsan Fitra. *Partisipasi Poltik Masyarakat Kuantan Singingi (Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2006)*. Skripsi, Tahun 2007.

Selanjutnya, hubungan perananan politik dalam penelitian ini penulis banyak menemukan karya ilmiah, dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis dan disertasi yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun dalam kajian peranan politik yang penulis teliti ini memiliki banyak kesamaan dalam mengkaji masalah peranan politik baik secara teoritis maupun pendekatan metodologis. Demiakian halnya penelitian ini menjadi berbeda dengan penelitian yang lain yang penulis

temukan adalah penentuan objek dan subjek penelitiannya, penulis menjadikan Ninik Mamak sebagai alat ukur peranan politik dalam pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Kuantan Singingi. Dan yang lebih membuat unik dan menariknya penelitian ini adalah proses peranan politik dalam kemenangan saudara Drs. Darmizar sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditetapkan secara bersama oleh ninik mamak Kenegerian Kopah.

2.6.Konsep Operasional

- a. Analisis** adalah sifat yang menguraikan suatu permasalahan dengan menganalisa lebih mendalam sehingga akhir dari pengkajian itu didapatkan suatu sikap yang memuaskan.
- b. Faktor-faktor** adalah hal yang mempengaruhi selain masalah yang diteliti, sehingga dengan faktor itu bisa mendukung atas apa yang diharapkan.
- c. Peran** adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.
- d. Pemilu Legislatif** adalah suatu proses pemilihan perwakilan anggota masyarakat yang diutus untuk mewakili dalam lembaga legislative yang bernama anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang diatur dengan undang-undang dan sistem serta regulasi yang ada sesuai dengan ketentuan yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.7 Operasional Variabel

Merujuk pada pendapat Mochtar Mas'ood (1990: 90) definisi operasional adalah serangkaian prosedur yang mencandra (menggambarkan) kegiatan yang harus dilakukan kala hendak mengetahui eksistensi empiris atau derajat eksistensi empiris suatu konsep. Sedangkan operasional secara sederhana merupakan penjelasan tentang indikator-indikator pengukur dari suatu variabel.

Adapun yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor Sosial Budaya

Penelitian ini sesuai dengan pendapat Narwoko dan Suyanto (2006:200), yaitu yang dimaksud dengan faktor sosial budaya adanya ikatan primordialisme antara calon maupun kelompok pendukung atas dasar solidaritas etnis, suku, struktur sosial budaya, atau sentimen keadaerah. Hal ini tergambar dari hubungan masyarakat dengan kepala suku atau pimpinan suku yang ada di Kenegerian Kopah, karena cucu kemenakan tidak menolak atas perintah ninik mamak dalam pemberian suara calon anggota legislatif tahun 2009 terhadap Drs. Darmizar di Kenegerian Kopah.

2. Faktor Lingkungan Keluarga

Yang dimaksud faktor lingkungan keluarga adalah faktor yang disebabkan adanya pengaruh seorang kepala keluarga atas hubungan perkawinan dan lingkungan keluarga. Dalam hidup bermasyarakat hubungan kekeluargaan bisa memberikan atau menopang secara politik karena dalam lingkungan keluarga merupakan kekuatan awal untuk menghimpun suara dalam proses dan perjalanan

politik sebagai hal dasar untuk memilih calon anggota legislatif tahun 2009 di Kenegerian Kopah. Hal inilah salah satu yang bisa memenangkan calon anggota legislatif tersebut.

3. Faktor Ekonomi

Pada faktor ekonomi yang menjadi ukuran adalah mata pencaharian dan pendapatan masyarakat. Tingkat ekonomi masyarakat merupakan alat ukur kerja politik yang ada pada pemilihan calon anggota legislatif tahun 2009, sebagaimana suatu daerah dengan tingkat ekonomi dan politik berbanding lurus atas apa yang dilakukan dalam proses politik. Hal ini tergambar pada pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di Kenegerian Kopah karena tingkat ekonomi dan tingkat penghasilan masyarakat tidak berpengaruh kepada politik uang/*money poitic*.

4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan dilihat dari tingkat pendidikan formal dan pendidikan politik masyarakat pedesaan khususnya di Kenegerian Kopah. Dalam undang-undang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa pendidikan sejalan dengan perjalanan sistem politik nasional maupun lokal, makanya pendidikan merupakan hal penting sebagai wujud pendewasaan politik harapan penulis bias memberikan pelajaran kepada masyarakat adat yang ada di Kenegerian Kopah dalam proses pemilihan anggota legislatif tahun 2009 di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 2.6**Operasionalisasi Variabel Menurut Faktor dan Indikatornya**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Analisis Faktor-faktor Yang Berperan Dalam Kemenangan Calon Anggota Legislatif Tahun 2009(Studi Kasus Kemenangan Drs.Darmizar di Kenegerian Kopah Kabupaten Kuantan Singingi)	1. Sosial Budaya	1. Nilai Sosial Budaya 2. Struktur Sosial Budaya 3. Adaptasi
	2. Lingkungan Keluarga	1. Suku Adat 2. Kepala Keluarga 3. Pengaruh pihak keluarga ayah dan ibu
	3. Ekonomi	1. Matapencaharian masyarakat 2. Pendapatan masyarakat
	4. Pendidikan	1. Tingkat pendidikan formal masyarakat 2. Pendidikan non-formal (wawasan politik)

Sumber: Narwoko dan Suyanto, 2006: 200

BAB III

METODE PENELITIAN

2.1. Waktu dan Tempat Penelitian

2.1.1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Mei– Julidi Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Tengah Kenegerian Kopah Tahun 2013.

2.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Tengah Kenegerian Kopah Tahun 2013.

2.2. Sumber Data

2.2.1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama atau sumber aslinya (Suryabrata, 2003: 39). Adapun data-data primer tersebut meliputi sebagai berikut :

1. Data yang berkaitan dengan identitas responden tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peranan ninik mamak, misalnya faktor ekonomi, pendidikan, keluarga maupun sosial budaya kemasyarakatan.
2. Data tentang bentuk-bentuk atau tipologi masyarakat pemili di Kecamatan Kuantan Tengah Kenegeraian Kopah pada Pemilukada Kuansing tahun 2011 yang diperoleh dari hasil penyebaran angket, wawancara dan survei lapangan.

2.2.2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data-data dimana penulis memperoleh informasi, keterangan-keterangan yang bersumber dari dokumen, laporan arsip yang didapatkan dari pihak-pihak terkait. Adapun data-data sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sejarah dan gambaran umum Kenegerian Kopah
2. Laporan hasil pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009
3. Dan data lainnya yang dianggap penting dan relevan dengan penelitian.

2.3. Populasi dan Sampel

2.3.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan masyarakat Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah dengan jumlah pemilih 8.540 orang yang terdiri dari 5 desa.

2.3.2. Sampel

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi nara sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian wakil dari populasi yang diteliti. Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Umar, 2005: 156). Sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : Persen kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir.

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

$$n = \frac{2.918}{1 + 2.918 (10\%)^2}$$

$$= \frac{2.918}{1 + 2.918 (0,1)^2}$$

$$= \frac{2.918}{1 + 2.918 (0,01)}$$

$$= \frac{2.918}{2.920 (0,01)}$$

$$= \frac{2.918}{2.920}$$

$$= 99,99$$

$$= 100 \text{ orang}$$

2.4. Teknik Pengumpulan Data

2.4.1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan atau terjun langsung ke lokasi penelitian.

2.4.2. Kuisisioner

Kuisisioner yaitu berupa daftar pertanyaan dimana responden tinggal memilih jawaban yang sudah peneliti sediakan.

2.4.3. Wawancara

Wawancara mendalam atau *indepty* yaitu pengumpulan data oleh peneliti dengan cara menanyakan secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi-informasi yang valid baik menggunakan alat perekam maupun alat pencatat.

Sedangkan instrument penelitian yang digunakan peneliti adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrument penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang sah dan reliable. Menurut Lexi J Moleong (1988:177) penelitian dengan metode kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, akan tetapi peranan penelitian yang sangat menentukan keseluruhan skenarionya. Hal ini mungkin dapat dipenuhi karena peneliti langsung kelapangan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan.

2.5. Teknik Analisa Data

Untuk menguji kebenaran penelitian secara empirik, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, sehingga bisa menjelaskan hukum kausalitas atau sebab akibat yang mempengaruhi faktor-faktor peranan dan kecendrungan bentuk atau tipologi pemilih masyarakat pedesaan. Analisa deskriptif ini diawali dengan pengumpulan data, penyajian data, analisa data secara empiris dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Ringkas Kabupaten Kuantan Singingi

Zaman dahulu Kuantan Singingi yang dikenal dengan sebutan Rantau Kuantan merupakan suatu daerah yang berada dibawah Pemerintahan Datuk sebagai pemegang teraju adat yang mengatur kehidupan masyarakat. Daerah ini juga disebut Rantau Nan Kurang Oso Duo Pulau artinya rantau yang kurang satu dari dua puluh dengan demikian ada 19 rantau yang tercakup didalamnya yaitu meliputi kenegerian disepanjang aliran Sungai Kuantan yang dimulai dari Lubuk Ambacang dibagian Hulu sampai ke Cerenti sebagai bagian hilir (UU Hamidi, 1995: 1).

Sesuai dengan perkembangan zaman yang selalu berubah dimana pemerintah yang tadinya dibawah pemerintahan datuk, kini berubah bentuk menjadi sistem dan corak pemerintahan modern yang merupakan penjabaran UUD 1945 yang berlaku di negara ini dan begitu juga halnya pada 19 rantau yang kini sudah dibagi desa-desa yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi.

Sepintas melihat dari sejarah berdirinya, Kuantan Singingi dapat dikatakan sebagai Kabupaten baru. Pada awalnya Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang pada waktu itu sebagai Kabupaten Induk. Dengan bergulirnya Era Reformasi pada tanggal 21 Mei 1998 ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, semua bentuk otoritas kekuasaan yang terpusat kepada pemerintahan yang otoriter, menutupi mati sistem demokrasi yang berkembang, sehingga momen ini membuka ruang

gerak yang begitu luas bagi Tokoh dan Masyarakat Kuantan Singingi dalam menyuarkan aspirasinya terhadap pembentukan Kabupaten baru.

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya dibawah pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai sebuah Kecamatan. Namun setelah dikeluarkannya undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi. Saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi sebuah kabupaten defentif yang mempunyai 12 kecamatan.

4.2.Kondisi Geografis, Tofografi, Hidrologi, Klimaologi.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Kabupaten yang berkembang dengan pesat dapat dilaihat dari luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, yang terletak pada :

- $0^0 00$ Lintang Utara – $1^0 00$ Lintang Selatan.
- $101^0 02$ Bujur Barat – $101^0 55$ Bujur Timur.

Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Kurang Lebih 7.656,03 Km Bujur Sangkar, dengan jarak dari permukaan laut 120 Km dan ketinggian berkisar 25-30 Meter dari permukaan laut.

Batas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi ini berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- Sebelah Selatan : Propinsi Jambi
- Sebelah Barat : Propinsi Sumatra Barat
- Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hulu. (Kuansing Dalam Angka, Tahun 2012)

Kabupaten Kuantan Singingi sebagian bagian dari Provinsi Riau terletak pada jalur perhubungan lalu lintas darat antara Provinsi Sumatra Barat dengan Kabupaten Indragiri Hulu. Hubungan lalu lintas darat dengan ibukota Provinsi (Pekanbaru) dapat ditempuh dengan jarak yang begitu singkat sehingga mobilitas masyarakat cukup tinggi. Termasuk hubungan perdagangan dengan Provinsi Sumatra Barat berjalan lancar, dikarenakan kedekatan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Provinsi tersebut juga tidak terlalu jauh sehingga mudah dijangkau.

Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu: Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Keberadaan kedua sungai itu memiliki potensi dan peranan yang begitu besar bagi kelangsungan kehidupan masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dari ketergantungan masyarakat terhadap sungai dalam memanfaatkannya sebagai sumber air bersih, budidaya perikanan dan sumber daya buatan tenaga listrik.

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $32,6^{\circ}\text{C}$ – $36,5^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum berkisar antara $19,2^{\circ}\text{C}$ – $22,0^{\circ}\text{C}$. Curah hujan antara 74,00 – 327,50 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar :

- Musim hujan jatuh pada bulan September s.d Februari.
- Musim kemarau jatuh pada bulan Maret s.d Agustus. (Kuansing Dalam Angka Tahun 2012)

4.3.Komposisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan

4.3.1. Penduduk

Permasalahan umum kependudukan adalah bagaimana mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mencapai manusia yang berkualitas. Kabupaten Kuantan Singingi juga menghadapi permasalahan yang sama.

Program kependudukan meliputi pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian, perpanjangan angka harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan.

Senada dengan Kabupaten lain, permasalahan penduduk Kabupaten Kuantan Singingi adalah bagaimana mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mencapai manusia yang berkualitas.

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2011 tercatat sebanyak 302.764 jiwa yang terdiri dari 155.364 jiwa laki-laki dan 147.310 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Kuantan Tengah yaitu 56.564 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Hulu Kuantan yaitu 8.215 jiwa.

Dilihat dari komposisinya, penduduk laki-laki banyak dari penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 155.364 jiwa dan perempuan berjumlah 147.310 jiwa. Rasio jenis kelamin cukup berimbang yaitu 105. Rasio jenis kelamin yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Singingi Hilir yaitu 113 dan rasio jenis kelamin yang paling rendah terdapat di kecamatan Pangean sebesar 98.

Program kependudukan meliputi pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian, perpanjangan angka harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan.

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi 2011 berjumlah 302.674 jiwa dengan jumlah laki-laki 155.364 jiwa dan perempuan 147.310 jiwa. Dapat dilihat dari table berikut :

Tabel. IV.1
Rasio Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	155.364 Jiwa
2	Perempuan	147.310 Jiwa
Total		302.674 Jiwa

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kuantan Singingi Tahun 2013

4.3.2. Tenaga Kerja

Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan penyediaan (supply) tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja (demand) yang cukup akan menciptakan pengangguran.

Pada tahun 2011 pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 6.417 orang yang terdiri dari 2.457 laki-laki (38.29%), dan perempuan 3.960 orang (61.71%). Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pencari kerja yang terdaftar adalah tamatan diploma sebanyak 4.496 orang (70.06%). Besarnya jumlah pencari kerja tamatan

diploma mengindikasikan bahwa perlu diciptakan lapangan kerja yang menampung pekerja dengan kualifikasi tamatan SMU atau sederajat.

4.3.3. Keadaan Pemerintahan

Kabupaten Kuantan Singingi yang beribu kota di Teluk Kuantan berkembang pesat seiring kemajuan pembangunan. Pada tahun 2001 Kabupaten Kuantan Singingi terdiri 6 kecamatan definitif dan 6 kecamatan pembantu, yang mencakup 10 kelurahan, 189 desa, definitif dan satu desa persiapan. Berdasarkan Perda Nomor. 16 Tahun 2002, Maka pada tahun 2002 Kabupaten Kuantan Singingi menjadi 12 kecamatan definitif dengan 10 kelurahan dan 190 desa definitif. Kini, Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 kecamatan dengan 11 kelurahan dan 198 desa.

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Kabupaten Kuantan Singingi yang baru berdiri tanggal 12 Oktober 1999, secara administratif dipimpin oleh seorang Bupati yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, sistem pemerintahan pada akhirnya lebih bersifat desentralisasi walaupun belum secara keseluruhan. Berdasarkan sistem itu pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki wewenang dalam menentukan bidang pemerintahannya. Kabupaten Kuantan Singingi didalam menjalankan roda pemerintahannya dipimpin oleh seorang Bupati.

Sesuai dengan semangat Otonomi Daerah, Bupati dalam menggerakkan aktivitas pemerintahannya telah membentuk Struktur organisasi Tata kerja (SOT) baru atas dasar Peraturan Daerah No. 34 sampai dengan 59 Tahun 2001 yang

terdiri dari 2 (dua) Sekretariat yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, 17 (tujuh belas) Dinas, dan 6 (enam) Badan, untuk lebih jelas jumlah dinas dan badan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel IV. 2
Nama Dinas dan Badan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2013

No	Dinas	No	Badan
1	Dinas Pendapatan	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA)
2	Dinas Pendidikan	2	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Bencana Alam
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Perlindungan Masyarakat
4	Dinas Kesehatan	4	Badan Kepegawaian Daerah
5	Dinas Kehutanan	5	Badan Lingkungan Hidup Promosi dan Investasi
6	Dinas Tanaman Pangan	6	Ispektorat
7	Dinas Perkebunan		
8	Dinas Perikanan		
9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
10	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air		
11	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		
12	Dinas Pasar Kebersihan		
13	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga		
14	Dinas Perhubungan Informasi Komunikasi		
15	Dinas Peternakan		
16	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan		
17	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja		

Sumber : Kuantan Singingi Dalam Angka 2012

Dinas dan Badan merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas membantu kegiatan Bupati dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari yang sesuai dengan wewenang, fungsi dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Sejak berdirinya Kabupaten Kuantan Singingi tahun 1999, Kabupaten Kuantan Singingi sudah memiliki kepala daerah yang menjadi kepala daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. IV. 3
Nama-nama Bupati di Kuantan Singingi Tahun 2000-2013

Nama Pejabat	Jabatan	Masa Jabatan
1. Drs. Rusdji S. Abrus	Bupati	Tahun 2000 – 2001
2. Drs. H. Asrul Ja'far	Bupati	Tahun 2001 - 2005
3. H. Sukarmis	Bupati	Tahun 2006- sekarang

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi 2012

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002, Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 Kecamatan definitif yang mencakup 11 Kelurahan, 198 Desa definitif. Untuk lebih jelas jumlah kecamatan dan kelurahan/desa yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. IV. 4
Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa
di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012

No	Nama Kecamatan	Ibu Kota	Kelurahan	Desa
1	Singingi	Muara Lembu	1	12
2	Kuantan Mudik	Lubuk Jambi	1	29
3	Kuantan Tengah	Teluk Kuantan	3	24
4	Benai	Benai	2	24
5	Kuantan Hilir	Baserah	2	26
6	Cerenti	Cerenti	2	9
7	Singingi Hilir	Koto Baru	-	12
8	Gunung Toar	Gunung Toar	-	13
9	Hulu Kuantan	Lubuk Ambacang	-	11
10	Logas Tanah Darat	Perhentian Luas	-	13
11	Pangean	Pangean	-	14
12	Inuman	Inuman	-	9
	Total		11	212

Sumber: Setda Kabupaten Kuantan Singingi 2013

Berdasarkan table diatas dilihat bahwa Desa yang terbanyak terdapat di Kecamatan Kuantan Mudik yang tercatat 29 Desa. Sedangkan urutan kedua terdapat di Kecamatan Kuantan Hilir sebanyak 26 Desa, kemudian urutan ketiga di Kecamatan Benai yang berjumlah 24 Desa, dan Kecamatan Kuantan Tengah sebanyak 24 Desa. Urutan keempat Kecamatan Pangean yang berjumlah 14 Desa.

Untuk urutan yang paling sedikit desanya terdapat di Kecamatan Cerenti dan Inuman. Dengan demikian, penyebaran Desa dimasing-masing Kecamatan tidak merata, hal ini dipengaruhi oleh aspek pemekaran Kecamatan yang tidakimbang. Kondisi seperti ini juga akan berpengaruh bagi tingkat penyebaran dan kepadatan penduduk dimasing-masing wilayah Kecamatan.(*Kuansing Dalam Angka Tahun 201*

4.4. Keadaan Kecamatan Kuantan Tengah

4.4.1. Luas Wilayah

Kecamatan Kuantan Tengah merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai jumlah penduduk 56.546 jiwa dengan luas wilayah 291.74 km² dan terdiri dari 26 desa/kelurahan.

Batas-batas wilayah Kecamatan Kuantan Tengah :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Singingi dan Gunung Toar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir dan Benai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Mudik dan Hulu Kuantan.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singingi dan Benai

4.4.2. Topografi

Topografi Kecamatan Kuantan Tengah merupakan tanah datar dan berbukit-bukit dengan ketinggian 300 meter dari permukaan laut. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah pada lapisan atas berjenis hitam gembur dan pada lapisan bawahnya berwarna kuning.

4.4.3. Iklim

Iklim di Kecamatan Kuantan Tengah merupakan iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 19,5 derajat celcius sampai dengan 34,2 derajat Celcius.

Sedangkan musim yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah ini adalah musim hujan dan musim kemarau, musim hujan terjadi pada bulan September

sampai dengan bulan Maret dan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Agustus.

4.4.4. Sungai

Sungai besar yang mengalir di Kecamatan Kuantan Tengah adalah sungai Kuantan yang merupakan aliran dari sungai yang ada di Provinsi Sumatra Barat yang bermuara ke Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir.

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

5.1. Identitas Responden

5.1.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun identitas menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. V.1
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	75	75 %
2	Perempuan	25	25 %
Jumlah		100	100 %

Sumber : Data Angket, 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jenis kelamin responden penelitian ini untuk Laki-laki berjumlah 75 orang (75 %) dan Perempuan berjumlah 25 orang (25 %).

5.1.2. Responden Berdasarkan Usia

Tabel. V.2
Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	17-25	18	18 %
2	26-35	29	29 %
3	36-45	25	25 %
4	46-55	19	19 %
5	55 keatas	9	9 %
Jumlah		100	100 %

Sumber: Data Angket, 2013.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa respondennya berumur 17-25 tahun berjumlah 18 orang (18 %), sedangkan responden yang berumur 26-35 berjumlah 29 orang (29%), responden yang berumur 36-45 tahun berjumlah 25 orang (25 %), responden yang berumur 46-55 tahun berjumlah 19 orang (19 %), dan responden yang berumur 55 keatas berjumlah 9 orang (9 %).

5.1.3. Tingkat Pendidikan

Untuk melihat tingkat pendidikan yang diraih oleh responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. V.3
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	15	15 %
2	SLTP	30	30 %
3	SLTA	35	35 %
4	Akademi/Sarjana	20	20 %
Jumlah		100	100 %

Sumber : Data Angket 2013

Dari tabel diatas terlihat pendidikan yang diraih oleh responden pada tingkat Sekolah Dasar berjumlah 15 orang (15%). Sedangkan yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat berjumlah 30 orang (30%). Responden yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat adalah 35 orang (35%) dan yang berpendidikan Akademi dan Sarjana yaitu 20 orang (20 %).

5.1.4. Pekerjaan Responden

Untuk menganalisa responden pada penelitian yang berdasarkan pada tingkat pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. V. 4
Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan Responden	Jumlah	Persentase
1	Petani	35	35 %
2	Pedagang	20	20 %
3	Perangkat Desa	15	15 %
4	Tokoh Masyarakat/Ninik Mamak	30	30 %
Jumlah		100	100 %

Sumber : Data Angket 2013

Dari tabel diatas terlihat identitas responden berdasarkan pekerjaan sebagai petani 35 orang (35 %). Sedangkan yang berpropesi sebagai pedagang berjumlah 25 orang (20%). Responden yang berpropesi sebagai perangkat Desa adalah 15 orang (15 %) dan responden dari tokoh masyarakat/ninik mamak berjumlah 30 orang (30 %).

5.2. Analisis Faktor-faktor Yang Berperan Dalam Kemenangan Calon Anggota Legislatif Tahun 2009 (*Studi Kasus Kemenangan Drs. Darmizar di Kenegerian Kopah Kabupaten Kuantan Singingi*)

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi Kemenangan Calon Anggota Legislatif Tahun 2009, Studi Kasus Kemenangan Drs. Darmizar di Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Pada bagian ini akan disajikan data yang diperoleh dari angket terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kemenangan Drs.Darmizar pada pemilu legislatif tahun

2009. Data tersebut akan dipaparkan dalam bentuk tabel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penyajian data berikut ini:

Berikut ini akan disajikan data yang diperoleh dari angket, dokumentasi, observasi yang telah dilaksanakan. Khusus data yang berasal dari angket akan dituangkan melalui tabel.

5.2.1. Faktor Sosial Budaya

Dalam indikator sosial budaya dalam penelitian ini penulis akan menguraikannya dalam bentuk sub-sub indikator yang akan menjelaskan muatan penelitian ini diantaranya adalah nilai sosial budaya, struktur sosial budaya, dan adaptasi.

Nilai sosial budaya dalam penelitian maksudnya adalah pada masyarakat adat terdapat nilai persatuan, persaudaraan dan soidaritas yang dibangun oleh nilai luhur adat istiadat, hal ini merupakan dasar penelitian yang penulis lakukan sehingga apa-apa yang termuat dalam nilai sosial budaya lebih mendekatkan penulis pada karakter masyarakat adatnya, bukan pada sistem politik dan pemerintahannya.

Struktur sosial budaya adalah unsur-unsur dalam ketaakelolaan pemerintahan desa, unsur ulama dan unsur-unsur adat serta sistem pemerintahan adat dan suku yang terdapat di Kenegerian Kopah.

Adaptasi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah bagaimana calon anggota legislatif tersebut bisa bersosialisasi ke masyarakat khususnya masyarakat adat yang ada di Kenegeraian Kopah Kabupaten Kuantan Singingi.

Hal ini akan penulis jelaskan dalam hasil angket yang penulis sebarakan kepada responden dalam bentuk tabel.

Angket yang disebarakan berjumlah sebanyak 100 exemplar. Angket tersebut berisi 13 pertanyaan terdiri dari tiga *option*. Adapun data yang penulis peroleh yang akan disajikan dalam bentuk tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. V.5
Jawaban Responden tentang Nilai Sosial Budaya Dalam Pemberian Suara
Pada Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Alternatif Jawaban	F	P
1	Berpengaruh	85	85%
2	Kurang berpengaruh	13	13%
3	Tidak berpengaruh	2	2%
Jumlah		100	100%

Data olahan 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat adat yang ada di Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi pada pemilihan anggota legislatif tahun 2009 ternyata 85 responden atau 85% responden menjawab sangat berpengaruh, karena masyarakat yang ada di Kenegerian Kopah masih memegang dan menjunjung tinggi nilai sosial budaya sehingga berpengaruh terhadap kemenangan Drs. Darmizar. 13 orang responden atau 13% responden menjawab kurang berpengaruh, sedangkan 2 orang responden atau 2% dari 100 orang responden menjawab tidak berpengaruh.

Tabel. V.6
Jawaban Responden tentang Struktur Sosial Budaya Yang Berpengaruh
Dalam Pemberian Suara Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif tahun
2009 di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Alternatif Jawaban	F	P
1	Berpengaruh	83	83%
2	Kurang berpengaruh	11	11%
3	Tidak berpengaruh	6	6%
Jumlah		100	100%

Data Olahan 2013

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 83 orang responden atau 83% responden menjawab bahwa struktur sosial budaya seperti unsur adat, ulama, pemerintahan desa sangat berpengaruh terhadap pemberian suara pada pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009 di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan menjawab kurang berpengaruh adalah 11 orang responden atau 11% responden, dan 6 orang responden atau 6% responden menjawab tidak berpengaruh.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa masyarakat yang ada di Kenegerian Kopahsangat mendukung dalam kemenangan Drs. Darmizar dalam pemberian suara pada pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009 dikategorikan bahwa faktor sosial budaya dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat adat, hal ini terlihat dari 100 orang responden, hanya 6 orang responden atau 6 % yang menjawab tidak berpengaruh, karena tingkat partisipasi politik tidak hanya diukur dari faktor sosial budaya disebabkan oleh pengaruh dan faktor yang lain lebih berpengaruh.

Tabel. V.7
Jawaban Responden Adaptasi Calon Anggota Legislatif dapat beradaptasi baik dengan Masyarakat

No	Alternatif Jawaban	F	P
1	Baik	80	80 %
2	Cukup Baik	11	11%
3	Kurang Baik	9	9%
Jumlah		100	100%

Data Olahan 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai adaptasi calon anggota legislatif tahun 2009 di Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dapat beradaptasi dengan baik, karena Drs. Darmizar ini adalah putra tempatan yang berasal dari Kenegerian Kopah sehingga untuk sosialisasi dan beradaptasi dengan adat istiadat tempatan tidak mengalami kesulitan sehingga hasil jawaban responden adalah 80 orang responden atau 80% responden menjawab sangat baik, 11 orang responden atau 11% responden menjawab cukup baik, sedangkan yang menjawab tidak baik adalah 9orang responden atau 9%.

Tabel. V. 8
Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Faktor Sosial Budaya
Mempengaruhi Dalam kemenangan calon anggota legislatif tahun 2009 di
Kabupaten Kuantan Singingi

No	Sosial Budaya	Jawaban Responden			
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	Jumlah
1	Nilai Sosial Budaya	85	13	2	100
2	Struktur Sosial Budaya	83	11	6	100
3	Adaptasi	80	11	9	100
Jumlah		248	35	17	300
Rata-rata		82.66 %	11.66 %	5.66%	100 %

Sumber : Data Olahan 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden mengenai faktor sosial budaya dengan jumlah rata-rata 82.66% responden menjawab berperan, rata-rata 11.66% responden menjawab kurang berperan, rata-rata 5.66% responden menjawab tidak berperan.

Dalam hasil analisis yang penulis lakukan melalui penyebaran angket belum memadai dalam hasil kajian ini, oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan ninik mamak yang ada di Kenegerian Kopah sebagai sumber kunci dalam penelitian ini, berikut ini hasil wawancara penulis dengan masing-masing kepala suku atau datuk penghulu dari masing-masing suku yang ada di Kenegerian Kopah.

Dalam proses pemilihan umum atau proses politik yang seyogyanya di ikuti oleh elit-elit politik, pemuda, tokoh masyarakat dan sangat jarang sekali di ikuti oleh pucuk pimpinan di dalam suku atau ninik mamak dalam sebuah lingkungan adat istiadat, hal ini akan dijelaskan dalam wawancara penulis dengan

ninik mamak yang ada di empat suku yang ada di Kenegerian Kopah dan di wakili oleh pengulu suku karena pengulu suku adalah ketua dari ke empat suku ninik mamak yang ada di kenegerian kopah.

“Sebenarnya proses politik yang terjadi di tahun 2009 itu merupakan sebuah proses pendewasaan kepada ninik mamak, karena hal ini dilatar belakangi oleh masalah tanah ulayat kami di ambil oleh perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tanah ulayat Kenegrian Kopah, mengapa hal ini saya sampaikan sudah bertahun-tahun tanah ulayat kami di serobot oleh PT. Duta Palma Nusantara dan malahan sampai sekarang. Masalah inilah yang melatar belakangi kami masyarakat Kenegrian Kopah memutuskan untuk memperjuangkan hak dan aspirasi kami di lembaga DPRD Kuantan Singingi, karena sebelum ada wakil di lembaga legislatif kami di ibaratkan anak yang kehilangan induk, masyarakat tidak ada lagi tempat mengadu, dan malahan semua proses sudah kami lakukan, melapor ke anggota DPRD Kuantan Singingi tidak pernah di indahkan, bupati, dan malahan sampai kepada presiden kami melaporkan nasib kami ini. Hal inilah sebenarnya kami masyarakat Kenegerian Kopah memutuskan bahwa dalam musyawarah adat Kenegerian Kopah menentukan sikap untuk mempercayakan kepada wakil rakyat di DPRD Kauntan Singingi tahun 2009 itu ditetapkan untuk mendukung saudara Drs.Darmizar ini sebagai wakil kita masyarakat Kenegerian Kopah, besar harapan kami beliau memperjuangkan hak dan aspirasi kami masyarakat adat yang ada di Kenegrian Kopah. Semua itu masyarakat Kenegerian Kopah menaruh harapan besar masalah ini selesai, Tapi disinalah sebenarnya kami sudah agak kurang mempercayai wakil kami di DPRD Kuantan Singingi sudah hampir habis masa jabatannya di tahun 2013 ini belum juga ada hasilnya, kepada siapa lagi kami akan mengadukan masalah kami ini. (Wawancara Dengan Datuk Musa Sili, 22 Juni 2013)

Disamping saudara Drs.Darmizar ini ditetapkan sebagai orang yang dipercayai oleh masyarakat adat Kenegerian Kopah, beliau juga memiliki sifat yang *low profil* atau beliau juga bisa hidup bermasyarakat dan selalu memberikan bantuan, sikapnya yang peduli dengan kehidupan sosial kemasyarakatan beliau juga sering memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya di Kenegaian Kopah hal ini sangat menggalakkan adat istiadat, seperti jalur atau sampan besar yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang menjadi ikon budaya yang sudah

menduinia ini. Beliau terkenal sering memberikan bantuan kepada aset-aset budaya yang ada di Kenegrian Kopah.

Hal yang berperan dalam skripsi penulis teliti ini salah satunya adalah nilai sosial budaya yang maksud peneliti yaitu pada masyarakat adat terkandung nilai persatuan, persaudaraan dan solidaritas yang di bangun oleh nilai luhur adat istiadat. Dan didalam nilai sosial budaya ini terdapat struktur sosial budaya yakni pola kepemimpinan desa, berbaur dengan para ulama, serta unsur-unsur adat seperti, memberikan bimbingan teknis, cara dan pola memimpin pemerintahan desa, secara pribadi Drs.darmizar adalah seorang yang lebih dekat dengan para ulama karena beliau tergabung dalam kelompok tarekat yang ada di Kenegrian Kopah, selain itu juga Drs.Darmizar sebagai dewan penasehat Panitia Hari Besar Islam (PHBI) di Kenegrian Kopah. Dari hasil amatan penulis menjelaskan bahwa Drs.Darmizar ini sangat dekat dengan masyarakat karena secara sosial budaya hubungan kekerabatanya sangat erat sehingga beliau dikenal oleh masyarakat Kenegrian Kopah

Selain struktur sosial budaya sebagai penunjang kemenangan Drs.Darmizar juga terdapat adaptasi. Adaptasi adalah bagaimana calon anggota legislatif tersebut berbaur dan menyatu dengan masyarakat adat yang ada di Kenegrian Kopah, hal yang tidak menyulitkan bagi Drs.Darmizar karena Kenegrian Kopah merupakan tumpah darah beliau, sejak kecil sampai sekarang beliau senantiasa berbaur dan bergaul sebagaimana layaknya masyarakat umum. Contohnya beliau tidak mengalami kesulitan dalam menyampaikan visi pencalonan sebagai anggota legislatif, karena beliau menggunakan bahasa

kampung yang ada di Kenegrian Kopah. Jadi kemengan Drs. Darmizar ini hemat penulis salah satunya di motori oleh nilai sosial budaya di dalamnya terdapat sruktur sosial budaya dan adaptasi yang baik dan bagus di dalam hidup ber masyarakat di kenegerian kopah.

5.2.2. Lingkungan Keluarga

Dalam indikator lingkungan keluarga penelitian ini penulis akan mengurainya dalam bentuk sub-sub indikator yang akan menjelaskan muatan peneltian ini diantaranya adalah suku adat, kepala keluarga dan pengaruh pihak keluarga ayah dan ibu.

Suku adat adalah sebuah nilai luhur dalam bentuk kelompok-kelompok yang menghimpun masyarakat adat sesuai dengan garis keturunan yang dibentuk secara sosial, suku terbentuk di Kenegerian Kopah berdasarkan matrilinear atau garis keturunan kepada ibu. Dalam penelitian ini suku adat merupakan hubungan kekerabatan yang dibangun dari lingkungan keluarga secara turun temurun.

Kepala keluarga adalah pemimpin tertinggi yang ada dalam kelompok kecil yang disebut keluarga, karena kepala keluarga memiliki peran penting untuk mengarahkan sistem politik terkecil dalam teori politik sub terkecil merupakan penentu jalannya politik terbesar. Makanya kepala keluarga merupakan pimpinan tertinggi dalam sebuah kelompok yang di sebut keluarga.

Pengaruh pihak keluarga ayah dan ibu maksudnya adalah penyatuan dua keluarga yang berbeda menuju visi politik yang sama dalam satu pimpinan sebagai kebijakan politik keluarga, hal ini penulis jelaskan hubungan keluarga atau disebut besanan.

Tabel. V.9
Jawaban Responden tentang Suku Adat dapat dalam pemberian suara pada pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009

No	Alternatif Jawaban	F	P
1	Berpengaruh	82	82%
2	Kurang berpengaruh	16	16%
3	Tidak berpengaruh	2	2%
Jumlah		100	100%

Data Olahan 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 100 orang responden 82 orang responden atau 82% responden memberikan jawaban berpengaruh bahwa masyarakat Kenegrian Kopah memberikan suara pada pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009 di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan suku adat, karena menurut penulis tipe pemilih masyarakat pedesaan itu adalah pemilih emosional, bukan pemilih rasional ini di latar belakang oleh kehidupan yang dipengaruhi oleh suku dan adat istiadat yang ada. 16 orang responden atau 16 % responden yang menjawab kurang berpengaruhnya hubungan kesukuan dan hubungan kekeluargaan dalam pemberian suara pada pemilihan anggota legislatif di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan menjawab tidak berpengaruh dalam pemberian suara adalah 2orang responden atau 2% responden.

Tabel. V.10

**Jawaban Responden Tentang Hubungan Perkawinan / Kepala Keluarga
Berpengaruh Terhadap kemenangan Drs.Darmizar**

No	Alternatif Jawaban	F	P
1	Berpengaruh	81	81%
2	Kurang berpengaruh	17	17%
3	Tidak berpengaruh	2	2%
Jumlah		100	100%

Data Olahan 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kemenangan Drs.Darmizar lebih dipengaruhi oleh hubungan perkawinan/kepala keluarga hal ini dapat dilihat dalam pemberian suara pada pemilihan umum anggota legislatif di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ternyata jawaban responden adalah 81 orang responden atau 81% responden menjawab berpengaruh, karena hubungan perkawinan atau hubungan sebagai kepala keluarga sangat menentukan dalam pemberian suara dalam pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009 di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang menjawab kurang berpengaruh 17 orang responden atau 17%. Sedangkan yang menjawab tidak berpengaruh 2 orang responden atau 2%.

Tabel. V.11
Jawaban Responden Tentang Pengaruh Pihak Ayah dan Ibu Berpengaruh
Terhadap kemenangan Drs.Darmizar

No	Alternatif Jawaban	F	P
1	Berpengaruh	18	18%
2	Kurang berpengaruh	72	72%
3	Tidak berpengaruh	10	10%
Jumlah		100	100%

Data Olahan 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa frekuensi jawaban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan pihak ayah dan ibu kurang berpengaruh terhadap pemberian suara pada pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009 di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, karena pihak ayah dan ibu tidak bisa menentukan pilihan dan penetapan suara dalam pemilihan umum kepala daerah disebabkan oleh hubungan kekerabatan antara ayah dan ibu terhadap keluarganya sangat jauh oleh karena itu penulis menganggap kurang berpengaruh dalam pemberian suara. Hal ini dapat dilihat dapat dilihat dari 100 orang responden, 18 orang responden atau 18% responden menjawab berpengaruh, yang menjawab kurang berpengaruh 72 orang responden atau 72% responden sedangkan yang menjawab menjawab tidak berpengaruh adalah 10 orang responden atau 10%.

Tabel.V. 12
Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Faktor Lingkungan Keluarga
Mempengaruhi Kemenangan Drs. Darmizar pada Pemilihan umum anggota
legislatif tahun 2009 di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Lingkungan Keluarga	Jawaban Responden			
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	Jumlah
1	Hubungan Kekeluargaan Suku dan Adat	82	16	2	100
2	Kepala Keluarga	81	17	2	100
3	Keluarga Ayah dan Ibu	18	72	10	100
Jumlah		181	105	14	300
Rata-rata		60.33%	35.00 %	4.66 %	100 %

Sumber : Data Olahan 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden mengenai faktor lingkungan keluarga dengan jumlah rata-rata 60,33% responden menjawab berperan, rata-rata 35,00% responden menjawab kurang berperan, rata-rata 4,66% responden menjawab tidak berperan. Suku adat yang maksud penulis dalam penelitian ini adalah sebuah nilai luhur dalam bentuk kelompok-kelompok yang menghimpun masyarakat adat sesuai dengan garis keturunan garis sosial yang terbentuk di kenegerian kopah berdasarkan matrilinear atau keturunan kepada ibu

Dalam penjelasannya tentang suku dan adat istiadat yang terlingkup dalam sebuah wilayah hukum adat di Kenegerian Kopah ini terdapat 4 suku yang ada di Kenegerian Kopah tersebut, diantaranya adalah Suku Melayu yang menjadi Datuk Penghulunya adalah Kamiswan, Suku Caniago yang menjadi Datuk Penghulunya adalah Musa Sili, Suku Patopang yang menjadi Datuk Penghulunya adalah

Ahmad Yaduli, sedangkan Suku Paliang yang menjadi Datuk Penghulunya adalah Muhammad Darasit.

Dalam pandangan suku dan adat istiadat datuk penghulu inilah yang menjadi corong penentu kebijakan adat istiadat dan politik pada tahun 2009 yang lalu, keputusan tertinggi dipegang oleh empat orang datuk penghulu dari masing-masing suku yang ada di Kenegrian Kopah. Perlu juga penulis sampaikan dari ke empat suku yang ada di Kenegrian Kopah ini ada seorang datuk penghulu kayo yang dijadikan ketua dalam hal pengambilan keputusan, maka penulis mengadakan wawancara hanya pada salah seorang ketua datuk penghulu yang dipertua oleh ke empat datuk penghulu dari masing-masing suku.

Menurut hemat penulis adalah faktor suku adat merupakan salah satu indikator penting yang sangat mendukung proses kemenangan Drs.Darmizar, karena dari awal penelitian ini penulis menjadikan ninik mamak sebagai pengambil keputusan tertinggi di adat. Selain itu suku yang ada pada Drs.Darmizar adalah suku caniago. Hal yang menarik dari hasil amatan penulis ini adalah dari 4 suku yang ada di Kenegrian Kopah ini suku caniago mendapat kepercayaan sebagai datuk penghulu dari 4 suku yang ada di Kenegrian Kopah. Makanya secara politis Drs.Darmizar penulis menegaskan bahwa semua keputusan suku yang ada di Kenegrian Kopah berpijak kepada datuk penghulu Musa Sili sebagai petinggi yang dipercaya oleh masyarakat Kenegrian Kopah.

Selain suku adat yang memberikan peranan penting dalam proses kemenangan Drs.Darmizar, datuk penghulu selain memberikan titah kepada cucu kemenakan juga memberikan amanat kepada kepala keluarga.

Kepalakeuarga menurut penulis di sini adalah pimpinan tertinggi di kelompok kecil yang disebut keluarga karena kepala keluarga memiliki peran penting untuk mengarahkan sistem politik terkecil, contohnya pertemuan dua keluarga besar yang disatukan dalam bentuk ikatan perkawinan, di Kenegrian Kopah ikatan perkawinan ini di satukan dengan suku yang berlainan, menurut aturan adat nikah se-suku tidak dibenarkan oleh adat. Dengan adanya ikatan perkawinan seperti suku paliang dengan melayu terjalin pernikahan maka secara tidak langsung dengan adanya ikatan ini akan terjadi ke akrapan antar suku dan akan terjalin sanak pamili antar kedua suku yang awalnya beda suku kini menjadi satu keluarga. dan dikepalai oleh seseorang yang berperan mengarahkan dan menunjukan bahwa pilihan politik keluarga ditentukan oleh seorang ayah. Di kenegerian Kopah jika sanak pamili yang menentukan pilihan politik baik itu ayah laki-laki mengarahkan keluarga perempuan maka keluarga besar perempuan memikirkan dua kali untuk menolak permintaan dari keluarga laki-laki, karena di masyarakat adat kenegerian kopah rasa hormat-menghormati dan segan-menyegani sangat tinggi apalagi adanya hubungan ikatan perkawinan antar dua keluarga, maka malu keluarga perempuan jika tidak mengikuti permintaan politik keluarga laki-laki, terutama malu kepada menantu begitu juga sebaliknya malu keluarga laki-laki tidak mengikuti permintaan keluarga perempuan.

Ada juga hal yang tidak kalah pentingnya kala dua keluarga besar bersatu dalam satu ikatan perkawinan pihak keluarga ayah dan pihak keluarga ibu sangat berperan juga dalam proses kemenangan Drs. Darmizar, seperti ayah mertua memengaruhi para anak dan menantunya. Di Kenegerian Kopah terdapat tradisi

menantu sangat malu jika tidak ikut perintah mertua. Jadi pengaruh pihak keluarga ayah dan ibu menurut penulis juga sangat berperan dan hanya peranannya tidak sebanding dengan peran datuk penghulu yang penulis jelaskan dari awal penelitian ini. Yang dimaksud penulis dipenelitian ini pengaruh pihak keluarga ayah dan ibu adalah penyatuan dua keluarga yang berbeda menuju kebijakan visi politik yang sama dalam satu pimpinan sebagai kebijakan keluarga.

5.2.3. Ekonomi

Dalam indikator ekonomi penelitian ini penulis akan menguraikannya dalam bentuk sub-sub indikator yang akan menjelaskan muatan penelitian ini diantaranya adalah mata pencaharian masyarakat, pendapatan masyarakat.

Indikator ekonomi ini penulis hanya mendekatkan pada tingkat ekonomi masyarakat adat saja, karena menurut penulis ekonomi berbanding lurus dengan politik. Adapun yang dimaksud penulis dengan mata pencaharian masyarakat adalah sumber kehidupan masyarakat adat yang dilakoni setiap hari, hal ini sangat erat hubungannya dengan kondisi politik masyarakat pedesaan.

Pendapatan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran penghasilan masyarakat adat, masalah ini sangat menentukan nilai politik yang dibangun oleh sisi ekonomi-politik. Hal ini akan penulis jelaskan dalam bentuk tabel, sehingga bisa dinaraikan berdasarkan hasil kuisioner yang penulis sebariskan melalui angket.

Tabel. V.13

**Jawaban Responden Terhadap Mata Pencapaian Masyarakat
berpengaruh atas kemenangan Drs.Darmizar**

No	Alternatif Jawaban	F	P
1	Berpengaruh	65	65%
2	Kurang berpengaruh	25	25%
3	Tidak berpengaruh	10	10%
Jumlah		100	100%

Data Olahan 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencarian masyarakat dalam memberikan suara pada pemilihan umum anggota legislatif berdasarkan mata pencapaian hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang menyatakan berpengaruh adalah 65 orang responden atau 65% responden, kemudian 25 orang responden atau 25% responden menjawab kurang berpengaruh, dan yang menjawab tidak berpengaruh adalah 10 orang responden atau 10%.

Tabel. V.14

**Jawaban Responden Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat di
Kecamatan Kuantan Tengah Dalam Pemberian Suara pada pemilihan
umum anggota legislatif tahun 2009**

No	Alternatif Jawaban	F	P
1	Tinggi (> 5 Juta)	11	11%
2	Sedang (3-5 Juta)	75	75%
3	Rendah (< 3 Juta)	14	14%
Jumlah		100	100%

Data Olahan 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat berpenghasilan 3-5 juta hal ini dapat mempengaruhi partisipasi dalam kemenangan

Drs.Darmizar pada pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009 hal ini dapat dilihat pada 75 orang responden atau 75% yang menyatakan faktor tingkat pendapatan masyarakat yang sedang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat di Kenegerian Kopah, karena semakin rendah tingkat pendapatan masyarakat semakin mudah di pengaruhi dalam pemberian suara dengan politik uang. sedangkan 11 orang responden atau 11%, memberikan jawaban berpengaruh, 14 orang responden atau 14% memberikan jawaban tidak berpengaruh, karena semakin tinggi tingkat penghasilan masyarakat semakin sulit untuk dipengaruhi pemberian suara dalam *money* politik.

Tabel. V.15
Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Faktor Ekonomi Mempengaruhi
Kemenangan Drs.Darmizar pada pemilu anggota legislatif tahun 2009 di
Kabupaten Kuantan Singingi

No	Ekonomi	Jawaban Responden			
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	Jumlah
1	Mata Pencarian	65	25	10	100
2	Pendapatan	11	75	14	100
	Jumlah	76	100	24	200
	Rata-rata	38.00%	50.00%	12.00%	100 %

Data Olahan 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden mengenai faktor ekonomi dengan jumlah rata-rata 38.00% responden menjawab berperan, rata-rata 50.00% responden menjawab kurang berperan, rata-rata 12.00% responden menjawab tidak berperan.

Dari hasil penyebaran kuisioner dari indikator ekonomi yang penulis temukan adalah dari taraf kehidupan masyarakat yang ada di Kenegerian Kopah

memiliki tarap kehidupan ekonomi menengah keatas. karena di wilayah ini mata pencarian masyarakat umumnya bertani karet dan kebun kelapa sawit, adapun yang dimaksud mata pencarian menurut peneliti adalah sumber kehidupan masyarakat yang dilakoni setiap hari oleh masyarakat adat kenegerian kopah.

Hal inilah kiranya penulis menganggap bahwa tidak terpengaruhnya masyarakat dari sikap-sikap kotor para elit politik untuk melakukan *money politic* karena masyarakat umumnya sudah tersejahterakan secara ekonomi. Makanya setiap diadakannya pesta demokrasi dalam bentuk pemilu masyarakat tidak dimanjakan oleh sogok-menyogok para calon, oleh karena itu masyarakat bisa menentukan pilihannya sendiri tanpa di iming-imingi dengan bagi-bagi sembako dan segala jenisnya.

Menurut hemat penulis pada indikator ekonomi ini menunjukkan bahwa mata pencarian masyarakat berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat yang ada di Kenegrian Kopah karena masyarakat Kenegrian Kopah memiliki tingkat ekonomi sudah dikategori menengah ke atas. Adapun yang dimaksud pendapatan masyarakat adat kenegerian kopah oleh penulis adalah ukuran penghasilan masyarakat adat. Hal inilah membuat dukungan masyarakat secara politik dalam proses kemenangan Drs. Darmizar berperan sebagai hal yang sangat sulit merubah pola fikir masyarakat dengan memberikan sogok dalam bentuk *money politic*, karena kehidupan masyarakat Kenegerian Kopah secara ekonomis sudah dikategorikan sudah mapan sehingga pilihan masyarakat tetap pada pilihan awal yaitu Drs. Darmizar.

5.2.4. Faktor Pendidikan

Dalam indikator pendidikan penelitian ini penulis akan menguraikannya dalam bentuk sub-sub indikator yang akan menjelaskan muatan penelitian ini diantaranya adalah tingkat pendidikan formal masyarakat, pendidikan non-formal masyarakat.

Pendidikan formal masyarakat adalah sistem pendidikan yang dilakukan sesuai dengan proses dan terdaftar di pemerintahan.

Pendidikan non-formal masyarakat adalah sistem pendidikan yang dilakukan masyarakat adat dalam bentuk autodidak atau belajar sendiri-sendiri yang tidak terdaftar dilembaga pemerintahan, seperti sekolah yang berkenaan agama dan terbentuknya kelompok-kelompok pengajian sehingga kebanyakan masyarakat adat hanya memiliki pendidikan non-formal saja.

Tabel. V.16

**Jawaban Responden Tingkat Pendidikan Berpengaruh Dalam Kemenangan
Drs.Darmizar Dalam Pemilu Anggota Legislatif tahun 2009**

No	Alternatif Jawaban	F	P
1	Berpengaruh	84	84%
2	Kurang berpengaruh	12	12%
3	Tidak berpengaruh	4	4%
Jumlah		100	100%

Data Olahan 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan merupakan hal yang sangat mempengaruhi dalam pemberian suara pada pemilihan umum anggota legislatif di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi hal ini sebanyak 84 orang responden atau 84% responden

menyatakan jawabannya bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap peranan dalam memenangkan Drs.Darmizar, kemudian kurang berpengaruh sebanyak 12 orang responden atau 12%, yang menjawab tidak berpengaruh sebanyak 4 orang responden atau 4%.

Tabel. V.17
Jawaban Responden Faktor Pendidikan Formal dan Non Formal, Apakah Berpengaruh Terhadap Kemenangan Drs. Darmizar

No	Alternatif Jawaban	F	P
1	Berpengaruh	76	76%
2	Kurang berpengaruh	14	14%
3	Tidak berpengaruh	10	10%
Jumlah		100	100%

Data Olahan 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 76 orang responden atau 76% responden menjawab berpengaruh, karena pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat memberikan pencerahan baik pendidikan politik maupun pemahaman masyarakat terhadap perkembangan politik yang ada, kemudian 14 orang responden atau 14% responden menjawab kurang berpengaruh, kemudian yang menjawab tidak berpengaruh sebanyak 10 orang responden atau 10%.

Tabel. V.18

**Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Faktor Pendidikan
Mempengaruhi Partispasi Dalam Pemberian Suara Pada pemilihan Umum
Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Pendidikan	Jawaban Responden			
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	84	12	4	100
2	Pendidikan Formal dan Non-Formal	76	14	10	100
Jumlah		160	26	14	200
Rata-rata		80.00%	13.00%	7.00%	100 %

Data Olahan 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden mengenai faktor pendidikan dengan jumlah rata-rata 80.00% responden menjawab berperan, rata-rata 13.00% responden menjawab kurang berperan, rata-rata 7.00% responden menjawab tidak berperan.

Pada indikator pendidikan ini penulis menemukan hasil yang sudah biasa ditemukan peneliti lain, hal ini terlihat dari kuisioner berupa angket yang penulis sebarakan bahwa faktor pendidikan merupakan faktor yang termasuk berperan dalam proses kemenangan Drs.Darmizar dalam pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009, di Kenegerian Kopah partisapsi masyarakat untuk menuntut ilmu semua keluarga berlomba-lomba untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya keperguruan tinggi, karena hal ini berbanding lurus dengan penghasilan masyarakat secara ekonomi menengah keatas, hal inilah yang mendukung terjadinya tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan sangat berperan.Adapun yang dimaksud tingkat pendidikan oleh penulis disini adalah

jenis atau tamatan yang dimiliki oleh masyarakat adat kenegerian kopah baik itu pendidikan formal dan non-formal. Adapun yang dimaksud pendidikan formal oleh peneliti adalah sistem pendidikan yang dilakukan sesuai dengan proses dan terdaftar di pemerintah. Sedangkan yang dimaksud pendidikan non-formal adalah sistem pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat adat kenegerian kopah autodidak atau belajar sendiri-sendiri yang tidak terdaftar dilembaga pemerintahan seperti kelompok-kelompok pengajian.

Selain pendidikan formal dan non-formal yang menjadi hal pendukung dalam penelitian ini penulis juga memeberikan penjelasan bahwa pendidikan formal dari tingkat bawah sampai jenjang perguruan tinggi biasa membuat pola berfikir masyarakat lebih mengarah kepada pencerahan politik dan bukan hanya sekedar politik yang membabi buta, karena pendidikan masyarakat Kenegerian Kopah sudah memenuhi ketantuan yang sangat cukup sehingga konflik politik tidak terjadi ditengah masyarakat. Disamping itu pendidikan non-formal juga merupakan bagian penting yang terjadi di Kenegerian Kopah karena sebagian masyarakat umumnya mengikuti kajian tarekat yang ada di Kenegrian Kopah. Selain itu pendidikan non-formal ini seperti pendidikan surau, yasinan ibu-ibu/bapak-bapak.

Tabel.V.19

Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Analisis Faktor-faktor yang Berperan Dalam Kemenangan Calon Anggota Legislatif Tahun 2009 (Studi Kasus Kemenangan Drs.Darmizar di Kenegerian Kopah Kabupaten Kuantan Singingi)

No	Indikator	Jawaban Responden			
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	Jumlah
1	Sosial Budaya	248	35	17	300
2	Lingkungan Keluarga	181	105	14	300
3	Ekonomi	76	100	24	200
4	Pendidikan	160	26	14	200
Jumlah		665	266	69	1000
Rata-rata		66.5%	26.6%	6.9%	100 %

Data Olahan 2013

Berdasarkan hasil rekapitulasi akhir tabel diatas, penulis mengkategorikan bahwa analisis faktor-faktor yang berperan dalam kemenangan calon anggota legislatif tahun 2009 (Studi Kasus Kemenangan Drs.Darmizar di Kenegerian Kopah Kabupaten Kuantanm Singingi) dengan persentase 66.5% pada opsi berperan, sedangkan pada pilihan kurang berperan adalah 26.6%, selanjutnya pada opsi tidak berperan penulis menemukan angka 6.9%.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan berdasarkan penyebaran beberapa kuisioner dalam bentuk beberapa pertanyaan dapat penulis simpulkan bahwa faktor sosial budaya yang sangat berperan dalam penelitian ini karena didalamnya terdapat faktor adat istiadat yang menjadi penentu arah politik ninik mamak yang ditentukan oleh seorang pimpinan suku. Hal ini menunjukkan bahwa peranan ninik mamak dalam ranah politik sudah menjadi corong yang sangat kuat bagi masyarakat adat, kebanyakan daerah pemilihan dalam riset-riset lain ninik

mamak tidak menjadi penentu kebijakan politik tertinggi. Oleh karena itu menurut hemat penulis di Kenegerian Kopah ini sangat kental adat istiadat sehingga pada arah kebijakan politik saja ditentukan oleh ninik mamak.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

6.1.1 Sosial Budaya

Adapun salah satu fenomena masyarakat yang menarik perhatian penulis saat Pemilihan umum anggota legislatif di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2009. Dari hasil amatan penulis dilapangan terlihat bahwa masyarakat di Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ninik mamak memiliki peranan yang sangat penting karena setiap kebijakan politik yang dimotori oleh ninik mamak membuahkan sebuah kebijakan yang harus dipatuhi oleh cucu kemenakan yang ada di Kenegerian Kopah, selain itu antusiasme untuk mengikuti pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009, karena perwakilan dari masyarakat Kenegerian Kopah pada pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009 untuk pertama kalinya mengutus perwakilan dari Kenegerian Kopah. Partisipasi politik masyarakat yang datang ke TPS dimana mereka terdaftar sebagai pemilih untuk pemungutan suara. Partisipasi politik masyarakat yang sangat mudah diamati adalah pemberian suara atau hak pilihnya masyarakat terhadap Drs.Darmizar.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Kecamatan Kuantan Tengah tentang analisis faktor-faktor yang berperan dalam kemenangan calon anggota legislative tahun 2009 (Studi Kasus kemenangan Drs. Darmizar di Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi), penulis mengkategorikan bahwa hal yang berperan dalam kemenangan Drs.Darmizar ada beberapa faktor yang

mempengaruhi, yaitu: faktor sosial budaya mendominasi dari faktor lingkungan keluarga, ekonomi dan pendidikan.

Dari hasil kesimpulan penelitian di atas penulis memberikan kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah faktor sosial budaya di sebut sebagai masyarakat yang bersifat *gemeinschaft* yaitu adanya kehidupan bersama, dimana antar anggotanya mempunyai hubungan batin murni yang bersifat alamiah dan kekal. Dasar hubungannya adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang bersifat nyata dan organis terutama dapat dijumpai dalam keluarga, kelompok kekerabatan dan sebagainya pada masyarakat yang homogen, dalam hal faktor sosial budaya masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah khususnya di Kenegeria Kopah diketahui bahwa terlingkup dalam satu ranji adat istiadat yaitu adat rantau kuantan yang dikenal dengan negeri beradat, penulis melihat gejala ini akan membangun paradigma politik masyarakat adat lebih dekat kepada nilai-nilai sosial dan nilai-nilai adat istiadat.

6.1.2. Faktor Lingkungan Keluarga

Faktor lingkungan keluarga adalah faktor yang disebabkan adanya pengaruh seorang kepala keluarga atas hubungan perkawinan dari lingkungan keluarga, hubungan perkawinan dalam sebuah masyarakat ini merupakan hal yang sangat lumrah dan biasa, karena dimanapun daerah dan wilayah kekerabatan itu lebih dekat dengan ikatan keluarga tidak terkecuali di Kecamatan Kuantan Tengah khususnya Kenegerian Kopah. Dalam pandangan politik keluarga dan lingkungan keluarga merupakan hal yang sangat penting karena pendekatan yang paling utama pada keluarga dan dilingkungan keluarga adalah seorang kepala keluarga.

6.1.3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah mata pencarian dan pendapatan masyarakat yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah, faktor ekonomi menurut penulis dalam kajian ini merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pemberian suara dalam pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009. Di Kecamatan Kuantan Tengah khususnya Kenegerian Kopah termasuk tingkat ekonomi masyarakatnya tergolong tinggi karena pada umumnya masyarakat Kenegrian Kopah berprofesi sebagai petani karet dan sebagian lagi berkebun. Menurut hemat penulis semakin tinggi tingkat ekonomi masyarakat semakin tinggi partisipasi dalam pemberian suara, karena masyarakat tidak memandang dan terpengaruh dengan politik uang, dan bentuk *iming-iming* politik yang lain.

6.1.4. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan seseorang dalam merubah paradigma dan pola pikir dengan jalan mengkaji dan menggali dengan potensi akal dan naluri yang diberikan tuhan, dalam hal ini pendekatan kajian ini penulis mengkaji partisipasi dalam pandangan pendidikan formal dan non-formal serta pendidikan politik masyarakat adat, karena pendidikan dalam hal apapun tidak terkecuali dalam bidang politik merupakan hal yang paling utama. Pendidikan menurut kajian penulis adalah pendidikan yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberian suara pada pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009 di Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tingkat pendidikan masyarakat sudah tergolong tinggi dan sebagian besar masyarakat Kecamatan berpendidikan, sehingga faktor pendidikan merupakan

faktor pendukung terbentuknya sebuah kegiatan dan usaha berpartisipasi dalam politik.

6.2.Saran

Adapun hasil dari kajian yang di bahas di atas terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kenegerian Kopah dalam pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009 di Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi patut di acungi jempol, karena masyarakat adat Kenegerian Kopah dengan penuh kesadaran menggunakan hak pilihnya, karena cucu kemenakan masih mendengarkan arahan dan pandangan ninik mamak hal ini sesuai dengan ukuran tingkat partisipasi politik yang tinggi yang penulis teliti.
2. Untuk mengukur sejauh mana ninik makak mempengaruhi dalam kemenangan Drs.Darmizar dalam pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009 (menggunakan haknya) sesuai dengan keinginannya.
3. Agar masyarakat adat yang dipimpin oleh ninik mamak sadar dengan hak yang dimilikinya untuk berpartisipasi dalam kemenangan Drs.Darmizar.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo Meriam, Prof., *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Firmanzah,(2008).*Mengelolah Partai Politik: Komunikasih dan Positioning, Ideologi Politik dan Era Demokrasi* (edisi revisi) Yayasan Obor Inonesia
- Hamdi, Mukhlis. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*. Universitas Riau, Pekanbaru, 2006.
- Kartono. Kartini, (2008).*Pengantar Sosiologi Politik*.PT Raja Grafindo Persada, Kharisma Putra Utama Offset.Jakarta
- Linz *et al*, Juan J, *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat Belajar Dari Kekeliruan Negara Lain*, Bandung, Penerbit Mizan, 2001.
- Maran, Rafael Raga, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001.
- Moleong, Lexi J. Dr.MA., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000.
- Narwoko Dwi, J., Suyanto Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006
- Ndraha, Taziliduhu, *Keybernology; Ilmu Pemerintahan Baru*, Edisi I, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- Priyono AE., dkk, *Menjadikan Demokrasi Bermakna “Masalah dan Pilihan Di Indonesia*, Jakarta, Demos, 2007.
- Rush Michael, Althof Phillip, *Pengantar Sosiologi Politik, Diterjemahkan oleh Kartini Kartono*, Jakarta, Rajawali Press, 2003.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- Widjaja., HAW., Prof., Drs.,(2008)*Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Rajawali Press, Jakarta.
- Pratama, M. Salman, dkk (2008). *Pengertian Peran, Status, Nilai, Norma dan Budaya/Kebudayaan (makalah)*, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Tangkilisan, Hessel N.S., (2005). *Manajemen Publik*, Jakarta: Grasindo.
- Henslin, James M., (2007). *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi – Jilid 1*, Jakarta: Erlangga

ANGKET PENELITIAN

No :
Umur :
Pendidikan :
Pekerjaan :

SOSIAL BUDAYA

1. Pada masyarakat adat terdapat nilai persatuan, persaudaraan dan solidaritas, menurut anda apakah nilai sosial budaya dalam bentuk adat tersebut mempengaruhi dalam pemberian suara?
 - a. Berpengaruh
 - b. Kurang berpengaruh
 - c. Tidak berpengaruh, alasan...
2. Pada masyarakat desa terdapat struktur sosial budaya, yaitu unsur adat, ulama, dan pemerintahan desa, menurut anda apakah struktur tersebut berpengaruh?
 - a. Berpengaruh
 - b. Kurang berpengaruh
 - c. Tidak berpengaruh, alasan...
3. Apakah bakal calon anggota DPRD dapat beradaptasi dengan baik kepada masyarakat?
 - a. Baik
 - b. Cukup Baik
 - c. Kurang baik, alasan...

LINGKUNGAN KELUARGA

1. Menurut anda apakah hubungan Suku dan Adat dapat mempengaruhi dalam kemenangan Drs. Darmizar pada pemilihan umum Anggota Legislati tahun 2009 di Kabupaten Kuantan Singingi?
 - a. Berpengaruh
 - b. Kurang berpengaruh
 - c. Tidak berpengaruh, alasan...
2. Menurut anda apakah keluarga atas dasar hubungan perkawinan/kepala keluarga berpengaruh terhadap kemenangan Drs. Darmizar dalam pemberian suara?
 - a. Berpengaruh
 - b. Kurang berpengaruh
 - c. Tidak berpengaruh, alasan..
3. Dalam kekeluargaan terdapat pihak keluarga ayah dan ibu, menurut anda apakah pihak keluarga ayah dan ibu berpengaruh terhadap kemenangan Drs. Darmizar?
 - a. Berpengaruh
 - b. Kurang Berpengaruh
 - c. Tidak berpengaruh, alasan...

EKONOMI

1. Menurut anda apakah mata pencarian masyarakat berpengaruh dalam pemberian suara pada pemiliha anggota legislatif tahun 2009 di Kabupaten Kuantan Singingi?

- a. Berpengaruh
 - b. Kurang berpengaruh
 - c. Tidak berpengaruh, alasan...
2. Berapakah tingkat pendapatan masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah khususnya Kenegrian kopah?
- a. Tinggi (> 5 Juta)
 - b. Sedang (3 – 5 Juta)
 - c. Rendah (< 3 Juta)

PENDIDIKAN

1. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat desa di Kecamatan Kuantan Tengah khususnya di Kenegerian Kopah?
- a. Lulusan Perguruan Tinggi
 - b. Lulusan SLTAsederajat
 - c. Tidak Sekolah
2. Faktor pendidikan terdiri dari pendidikan formal dan non formal, apakah pendidikan formal dan non formal menentukan kemenangan Drs. Darmizar dalam pemberian suara pada pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009 di Kabupaten Kuantan Singingi?
- a. Berpengaruh
 - b. Kurang berpengaruh
 - c. Tidak berpengaruh, alasan..